



#2023
HMP THRIVE

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II
TAHUN 2023

Direktorat Jenderal
Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan
Perikanan

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Triwulan II Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran kepada *stakeholders* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban pelaksanaan amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi serta informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan LKj Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2023 adalah Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP) Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2023. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PDSPKP.

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Ditjen PDSPKP.

Jakarta, 28 Juli 2023
Direktur Jenderal PDSPKP



Budi Sulistiyo

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Budi Sulistiyo

PENYUSUN

Machmud

Budi Yuwono

Yayuk Sukarsih

Agustina Pujiastuti

Andika Adisukma

KONTRIBUTOR

Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan



IKHTISAR EKSEKUTIF

Ditjen PDSPKP telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023. Berdasarkan PK tersebut, terdapat 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja yang terdiri dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja (IK) yang menjadi target Ditjen PDSPKP.

Dari 24 indikator kinerja tersebut, sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja dapat dilakukan pengukuran pada Triwulan II Tahun 2023. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut diperoleh 4 (empat) indikator kinerja telah mencapai target dan 3 (tiga) indikator kinerja belum mencapai target Triwulan II tahun 2023. Dengan capaian dimaksud, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Ditjen PDSPKP pada Triwulan II Tahun 2023 yang ditunjukkan pada Aplikasi Kinerjaku adalah sebesar 95,93%.

Rincian capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dari 24 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 17 indikator kinerja bersifat tahunan, 2 indikator kinerja bersifat semesteran, dan 5 indikator kinerja bersifat triwulanan.
2. Sebanyak 17 indikator kinerja dimaksud yaitu (1) Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing, (2) Konsumsi Ikan (setara utuh segar), (3) Kinerja Logistik Hasil Perikanan, (4) Nilai PNBPK Ditjen PDSPKP, (5) Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP, (6) Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP), (7) Nilai PMPRB Lingkup Ditjen PDSPKP, (8) Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP, (9) Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP, (10) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP, (11) Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP, (12) Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP, (13) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP, (14) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP, (15) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP, (16) Tingkat Kepatuhan

Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP, serta (17) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP.

3. Dua indikator kinerja yang bersifat semesteran yaitu Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP.
4. Sedangkan 5 indikator kinerja yang bersifat triwulanan yaitu (1) Nilai Ekspor Hasil Perikanan, (2) Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan, (3) Pembiayaan Usaha KP melalui Kredit Program, (4) Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP, dan (5) Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.
5. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja belum mencapai target Triwulan II Tahun 2023 yang telah ditetapkan yaitu nilai ekspor hasil perikanan dengan persentase capaian 85,94% terhadap target Triwulan II Tahun 2023, pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program dengan persentase capaian 70,14% terhadap target Triwulan II Tahun 2023, dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Ditjen PDSPKP dengan persentase 99,85% terhadap target Triwulan II Tahun 2023..

Pada Triwulan II Tahun 2023, anggaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang dikelola oleh Ditjen PDSPKP adalah sebesar Rp388.500.000.000,-. Dari pagu anggaran awal tersebut, terdapat Auto Adjustment (AA) dan blokir sebesar Rp74.997119.000,- sehingga pagu anggaran efektif menjadi sebesar Rp313.502.881.000,-. Penyerapan anggaran Ditjen PDSPKP sampai dengan pada Triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar Rp32.659.831.524,- atau setara dengan 24,66% terhadap total pagu anggaran awal atau 31,15% terhadap pagu anggaran pasca AA dan blokir.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Keragaan Sumber Daya Manusia Aparatur	5
E. Permasalahan Utama.....	6
F. Sistematika Penyajian.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Rencana Strategis.....	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Capaian Kinerja.....	17
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	19
Sasaran Program 1. Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	20
1. Volume produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	20
Sasaran Program 2. Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Perikanan	23
2. Nilai Ekspor Hasil Perikanan.....	23
Sasaran Program 3. Meningkatnya Konsumsi Ikan Nasional	31
3. Konsumsi Ikan	31
Sasaran Program 4. Terwujudnya pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel, dan Berkelanjutan.....	35
4. Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan.....	35
5. Kinerja Logistik Hasil Perikanan.....	38
6. Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program	40
7. Nilai PNBPD Ditjen PDSPKP	44
8. Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP.....	46
Sasaran 5. Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan Meningkat.....	47
9. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)	47
Sasaran 6. Tatakelola Pemerintahan yang Baik Mendukung Penguatan Daya Saing KP.....	50
10. Nilai PMPRB Lingkup Ditjen PDSPKP	50
11. Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP	53
12. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP.....	55
13. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP	56
14. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP	58
15. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI	

atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP	60
16. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP	61
17. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP	63
18. Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	66
19. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP	67
20. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP	69
21. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP	70
22. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP	72
23. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP	73
24. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP	76
C. Realisasi Anggaran	78
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Permasalahan dan Rekomendasi	82
C. Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2022	83
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2023.....	15
Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Ditjen PDSPKP Periode Triwulan I Tahun 2023.....	18
Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	20
Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Nilai Ekspor Hasil Perikanan	23
Tabel 5. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Komoditas Utama Triwulan II Tahun 2023	24
Tabel 6. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor Triwulan II Tahun 2023.....	25
Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Konsumsi Ikan	31
Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan	36
Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Logistik Hasil Perikanan	39
Tabel 10. Ikhtisar Pencapaian Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program.....	41
Tabel 11. Rincian Pembiayaan Kredit Program di Sektor Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2023	41
Tabel 12. Ikhtisar Pencapaian Nilai PNBP Ditjen PDSPKP	44
Tabel 13. Rekapitulasi PNBP Ditjen PDSPKP sampai dengan triwulan II tahun 2023.....	45
Tabel 14. Ikhtisar Pencapaian Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing KP	46
Tabel 15. Ikhtisar Pencapaian Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP).....	48
Tabel 16. Ikhtisar Pencapaian Nilai PMPRB Lingkup Ditjen PDSPKP	51
Tabel 17. Ikhtisar Pencapaian Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Ditjen PDSPKP	53
Tabel 18. Ikhtisar Pencapaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP	55
Tabel 19. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP	56
Tabel 20. Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP	58
Tabel 21. Ikhtisar Pencapaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP	60
Tabel 22. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP	62
Tabel 23. Ikhtisar Pencapaian Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP	64
Tabel 24. Ikhtisar Pencapaian Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	66
Tabel 25. Ikhtisar Pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP.....	68

Tabel 26. Ikhtisar Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP	70
Tabel 27. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP	70
Tabel 28. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP	72
Tabel 29. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP	74
Tabel 30. Ikhtisar Pencapaian Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP	77
Tabel 31. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Kewenangan Triwulan II Tahun 2023	79
Tabel 32. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Jenis Kegiatan Triwulan II Tahun 2023	79

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen PDSPKP	4
Gambar 2. Struktur Organisasi BBP3KP	5
Gambar 3. Keragaman SDMA Ditjen PDSPKP Tahun 2023	5
Gambar 4. NKO Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2023.....	17
Gambar 5. Sosialisasi Pedoman Pendataan Utilitas dan VPO UPI MB kepada Enumerator	21
Gambar 6. Peta Sebaran Lokasi Penilaian Kesesuaian Produk KP Tahun 2023	22
Gambar 7. Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan.....	22
Gambar 8. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Triwulan II Tahun 2023	24
Gambar 9. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Provinsi Asal Triwulan II Tahun 2023.....	26
Gambar 10. Keikutsertaan KKP dalam <i>Seafood Expo Global (SEG) 2023</i> di Barcelona, Spanyol pada Tanggal 25 - 27 April 2023.....	29
Gambar 11. Sosialisasi Bursa Ikan di Provinsi Lampung pada Tanggal 10 Mei 2023.....	30
Gambar 12. Pertemuan Lintas Eselon I Terkait Persyaratan Eskpor Udang Tangkapan ke Amerika Serikat di Tangerang, pada tanggal 8 - 9 Juni 2023.....	30
Gambar 13. Persiapan Pertemuan dengan <i>Ministry of Agriculture Forestry, and Fisheries of Japan</i> tanggal 22 Juni 2023	30
Gambar 14. Pertemuan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan <i>US Departement of State</i> terkait Sertifikasi Udang Tangkapan Amerika Serikat, tanggal 14 April 2023	31
Gambar 15. Safari Gemarikan di Lampung Selatan pada Tanggal 20 Mei 2023	33
Gambar 16. Safari Gemarikan di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 16 Juni 2023.....	34
Gambar 17. Promosi/Kampanye melalui Media Sosial Gemarikan Tahun 2023	34
Gambar 18. Angka Perkiraan Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Sumber Permodalan Periode Triwulan II Tahun 2022 - 2023.	36
Gambar 19. Kegiatan <i>Benchmarking</i> Industri Pengolahan Udang di Sidoarjo, Jawa Timur.....	37
Gambar 20. Kegiatan Survei dan FGD Penyusunan Peluang Investasi Industri Pengolahan udang di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah	38
Gambar 21. Kegiatan Pendampingan Investasi Rumput Laut Kepada PT Sea Six Energy dan PT Regenerasi Kehidupan Nusantara (RKN) di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.....	38
Gambar 22. <i>Workshop</i> Penyusunan Metadata Indeks Kinerja Logistik Ikan tanggal 24 - 26 Mei 2023, di Bogor	40
Gambar 23. Realisasi Pembiayaan Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2023.....	41
Gambar 24. Pembinaan dan Monitoring kepada Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan secara Berkala	43

Gambar 25. Koordinasi dengan PUSDATIN dan Lembaga Keuangan dalam Rangka Pemenuhan Data Calon Debitur Potensial kepada SIKP.....	44
Gambar 26. Lokasi Sampling Perhitungan NTPHP.....	48
Gambar 27. Persiapan Materi <i>Workshop</i> NTPHP.....	49
Gambar 28. Persiapan <i>Workshop</i> Aplikasi NTPHP.....	49
Gambar 29. Pelaksanaan <i>Workshop</i> NTPHP.....	50
Gambar 30. Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan SOP Lingkungan Ditjen PDSPKP tanggal 6 -7 Juni 2023.....	51
Gambar 31. Pembahasan Usulan Proses Bisnis Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon II Lingkup Ditjen PDSPKP tanggal 15 Juni 2023.....	51
Gambar 32. <i>Morning Briefing</i> Reformasi Birokrasi tanggal 3 April 2023.....	54
Gambar 33. Penghitungan Formasi Statistisi dan Pranata Komputer, tanggal 5 mei 2023.....	57
Gambar 34. Rapat Pleno Penilaian Angka Kredit JF Pembina Mutu hasil KP dan JF Asisten Pembina Mutu Hasil KP, tanggal 20 - 23 Juni 2023.....	58
Gambar 35. <i>Sharing Session</i> Pengelolaan SAKIP di Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan.....	60
Gambar 36. Hasil Tangkap Layar pada Aplikasi SIDAK.....	63
Gambar 37. Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.....	67
Gambar 38. Pengawasan Terpadu <i>Cold Storage</i> Muara Baru, Jakarta.....	75
Gambar 39. Pertemuan Koordinasi terkait Serah Terima PIH Pejompongan.....	76
Gambar 40. Pendampingan Penilaian Sewa PIM Muara Baru.....	76
Gambar 41. Pendampingan Penilaian Kapal Jananuraga.....	76
Gambar 42. <i>Training of Trainer</i> Simulasi Input Data dalam Aplikasi Web Satudata KKP Bagi Enumerator dan Validator di Bandung 14 - 16 Juni 2023.....	78

DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2023



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diarahkan untuk mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing tinggi sehingga dapat bersaing di pasar domestik maupun internasional. Kebijakan dimaksud mengacu pada pendekatan *market driven* atau pasar yang menjadi acuan kebijakan, sehingga ketersediaan produk dapat diterima dan diminati oleh konsumen. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus merupakan produk kelautan dan perikanan yang memiliki sifat *high quality, safe, traceable, high value content* dan *competitive*. Kebijakan ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis Ditjen PDSPKP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Ditjen PDSPKP sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja

berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Ditjen PDSPKP menyusun Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2023. Laporan Kinerja ini akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan II Tahun 2023.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2023 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran strategis pada Triwulan II Tahun 2023 kepada *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai pada Triwulan II Tahun 2023 dan bagaimana proses pencapaiannya.

C. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, kedudukan Ditjen PDSPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Ditjen PDSPKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem

logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen PDSPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Ditjen PDSPKP dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Usaha dan Investasi;
3. Direktorat Logistik;
4. Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu;
5. Direktorat Pemasaran.



Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen PDSPKP

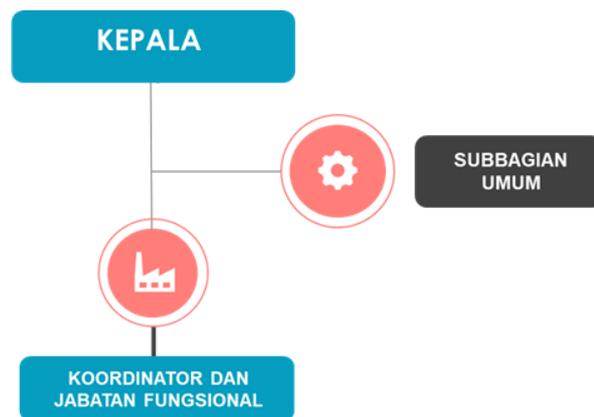
Ditjen PDSPKP memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 68/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan, BBP3KP mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, pengujian dan sertifikasi produk, serta pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan.

Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganeekaragaman produk kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;

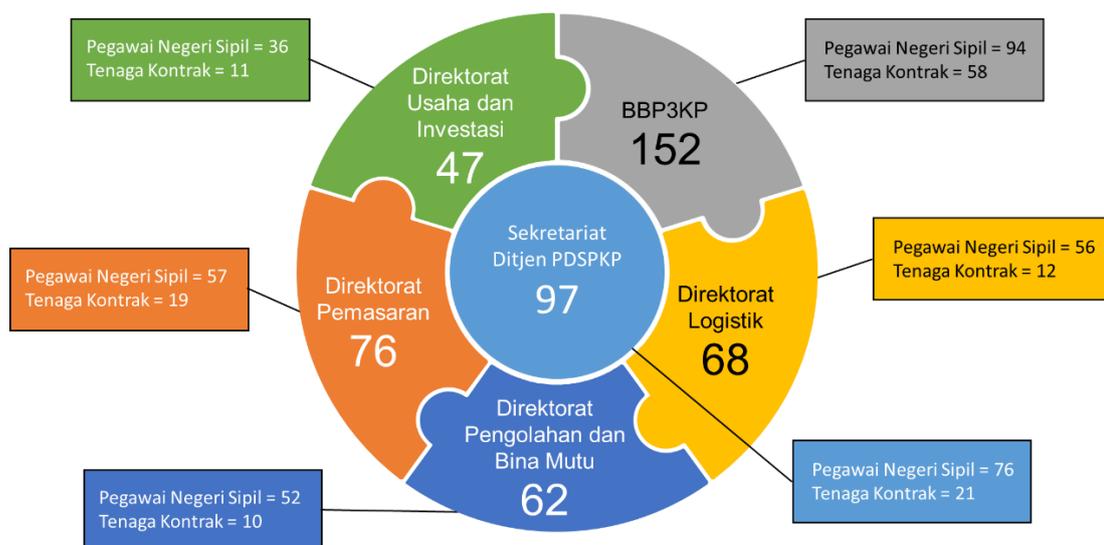
5. Pelaksanaan sertifikasi produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tanda kesesuaian produk kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
7. Pelaksanaan bimbingan teknis hasil uji terap, pengujian, dan sertifikasi produk kelautan dan perikanan; dan
8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.



Gambar 2. Struktur Organisasi BBP3KP

D. Keragaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah pegawai Ditjen PDSPKP Tahun 2023 mencapai 502 orang, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 3. Keragaan SDMA Ditjen PDSPKP Tahun 2023

E. Permasalahan Utama

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi terbagi dalam enam kelompok besar, yaitu tantangan peningkatan investasi dan pengembangan usaha, permasalahan efisiensi biaya logistik hasil kelautan dan perikanan, tantangan peningkatan ekspor ikan, ancaman *stunting*, permasalahan peningkatan kapasitas usaha dan mutu produk olahan perikanan skala usaha mikro kecil, dan permasalahan peningkatan usaha pengolahan skala menengah besar yang berkelanjutan. Tantangan peningkatan investasi dan pengembangan usaha umumnya terkait akses pembiayaan yang terbatas, kapasitas kelembagaan yang masih rendah dan cenderung lambat, infrastruktur perikanan yang belum memadai dan tidak merata di setiap wilayah. Kesulitan akses pembiayaan terutama terjadi pada pelaku usaha mikro kecil kelautan dan perikanan, karena belum *bankable* dalam skema pembiayaan dan kelayakan usaha. Di sisi lain, perbankan dan lembaga pemberi kredit minim informasi tentang calon debitur potensial. Beberapa pelaku usaha masih mengalami hambatan berusaha dan investasi terutama terkait perizinan, pajak, dan tumpang tindih regulasi. Namun bagi investor besar, tantangan yang dihadapi adalah minimnya informasi peluang usaha dan investasi kelautan dan perikanan yang salah satunya karena ketersediaan profil investasi yang *ready to offer* serta promosi usaha dan investasi yang belum berjalan optimal.

Pada tahap implementasi investasi, pelaku investasi kelautan dan perikanan sering terkendala tarif bea masuk barang modal (izin/pajak) yang masih tinggi, sementara insentif investasi yang diberikan belum berjalan optimal. Penyederhanaan birokrasi investasi melalui perizinan *online* yang dikembangkan Ditjen PDSPKP dan sistem perpajakan yang lebih baik, diharapkan dapat memberi solusi. Untuk permasalahan efisiensi biaya logistik hasil kelautan dan perikanan, masih terkait tata kelola dan koordinasi logistik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan swasta yang belum optimal, sarana dan prasarana logistik yang belum memadai, serta pengelolaan kelembagaan logistik yang belum optimal. Kondisi tersebut menyebabkan biaya logistik yang sangat tinggi di

Indonesia, yaitu mencapai 27% terhadap PDB, di mana aktivitas logistik hasil kelautan dan perikanan menjadi salah satu penyumbang utamanya. Bank Dunia (2018) menyatakan kinerja logistik Indonesia berada pada *ranking timeline* 41 dengan skor 3,67. Kinerja tersebut jauh di bawah Singapura (*ranking* 6, skor 4,32) dan tiga negara ASEAN lainnya (Thailand, Vietnam, dan Malaysia).

Di sisi sarana dan prasarana logistik, ketersediaan *cold storage*, pabrik es, dan gudang kering yang digunakan untuk penyimpanan produk kelautan dan perikanan belum merata di koridor logistik ikan, serta kapasitasnya juga masih terbatas. Sarana transportasi seperti mobil berpendingin dan mobil angkut ikan hidup jumlahnya juga sangat sedikit. Dari sisi rantai suplai, konektivitas dan informasi logistik yang ada masih bersifat asimetris, dimana aliran informasi ketersediaan ikan dari sentra produksi ke sentra distribusi/pemasaran yang membutuhkan ikan sering tersendat, tidak lengkap, dan lambat. Hal ini perlu dipecahkan dengan mengembangkan Sistem Telusur Logistik Ikan (STELINA) yang lebih baik dan implementasinya dapat berimprovisasi dengan *IoT system*.

Untuk ekspor hasil kelautan dan perikanan, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang sedang dihadapi terkait dalam pencapaian target ekspor, yaitu:

- Kapasitas pasokan produksi dan pemenuhan kualitas bahan baku untuk ekspor belum maksimal;
- Belum kompetitifnya produk perikanan di pasar utama dunia (rendahnya *market share*);
- Diversifikasi pasar dan produk ekspor belum optimal, hambatan ekspor di negara tujuan baik tarif maupun non tarif (SPS dan TBT);
- Adanya hambatan registrasi dan penambahan eksportir terdaftar di negara tujuan ekspor antara lain Uni Eropa, Rusia, RRT, Arab Saudi, dan Brazil;
- Rendahnya utilitas UPI untuk tujuan ekspor.

Ancaman *stunting* (gizi buruk) merupakan masalah yang erat kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. *Stunting* timbul salah satunya karena terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap ikan, terutama di wilayah pedalaman dan aksesnya jauh ke pesisir, harga ikan yang cenderung fluktuatif dipengaruhi oleh musim, dan rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya ikan untuk asupan protein dan gizi. Akibatnya, sering tidak peduli dalam pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari. Di samping itu, mutu ikan yang dijual di pasar-pasar yang jauh dari pesisir terutama yang pengelolaannya tradisional umumnya kurang baik, sehingga minat beli masyarakat turun. Beberapa wilayah juga belum menjadikan ikan sebagai sumber utama protein bagi keluarganya. Pemenuhannya diperoleh dari sumber nabati yang konsumsinya juga terbatas. Dalam hal pengembangan usaha skala mikro kecil, kapasitas produksi dan mutu produk olahan perikanan yang dihasilkannya masih rendah, padahal menjadi pelaku utama dalam penyediaan produk ikan di Indonesia termasuk ke pasar-pasar pedalaman. Akibatnya banyak dari mereka yang belum memenuhi standar kelayakan pengolahan. Hingga saat ini, jumlah usaha mikro kecil kelautan dan perikanan yang telah memiliki Sertifikasi Kelayakan Pengolahan masih di bawah 1%.

Penyebab utama dari rendahnya kapasitas usaha dan mutu produk olahan perikanan skala usaha mikro kecil di Indonesia diantaranya pengetahuan para pelaku usaha mikro kecil tentang standar mutu yang masih rendah, penyebaran usaha yang luas dan terfragmentasi, belum melaksanakan prinsip-prinsip usaha secara profesional, serta klasterisasi usaha skala mikro kecil yang belum berjalan baik. Akibatnya, pelaku usaha mikro kecil kelautan dan perikanan sering berjalan sendiri tanpa terdeteksi dan mengembangkan usaha dan mutu produk dengan kemampuan terbatas yang dimiliki. Permasalahan teknologi, modal, informasi dan akses pasar, serta perizinan juga banyak dihadapi pelaku usaha mikro kecil kelautan dan perikanan di hampir semua wilayah. Dalam hal pengembangan pasar, masih minim pembinaan, padahal dari segi jumlah pelaku aktif sangat potensial untuk menghasilkan produk UKM kapasitas ekspor. Keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan dan Sistem Rantai

Dingin (SRD) serta minimnya pengetahuan pelaku UMKM terkait standar teknis mutu produk kelautan dan perikanan (GMP, SSOP, HACCP, *traceability*) menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan produk ekspor UMKM kelautan dan perikanan.

Usaha pengolahan skala menengah besar juga memiliki permasalahan yang tidak kalah kompleks. Dalam hal peningkatan kapasitas usaha, pelaku usaha pengolahan skala menengah besar masih dihadapkan dengan permasalahan utilitas rendah, kompetisi pemenuhan bahan baku, fasilitas infrastruktur penunjang produksi yang terintegrasi, dan revitalisasi Sistem Rantai Dingin (SRD) yang belum optimal. Akibatnya sering kesulitan dalam memenuhi permintaan pasar berskala besar, terutama yang sifatnya kontinu. Persaingan bahan baku meningkat pada musim paceklik, sementara di saat banyak ikan tidak bisa menyetok karena tidak memiliki infrastruktur rantai dingin. Hal ini terus berulang setiap tahunnya, dan beberapa yang tidak kuat bersaing terpaksa menutup usahanya.

Dari sisi pengembangan mutu, usaha pengolahan skala menengah besar banyak yang belum sepenuhnya mengolah ikan tersertifikasi, belum terfasilitasi penerbitan standar teknis mutu (GMP, SSOP, HACCP, *Traceability*), dan belum memiliki sertifikat lingkungan. Permasalahan ini menjadi penghambat beberapa usaha pengolahan skala menengah besar dalam memanfaatkan peluang ekspor produk kelautan dan perikanan. Hal tersebut perlu dijadikan fokus dalam upaya penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan ke depan, sehingga mendukung peningkatan ekspor dan konsumsi ikan dalam negeri. Introduksi konsep-konsep Revolusi Industri 4.0 seperti digitalisasi usaha, perizinan *online*, lelang *online*, dan *block chain* dalam penelusuran bahan baku/logistik ikan perlu dilakukan. Perizinan *online* perlu terus disempurnakan dalam rangka fasilitasi kemudahan berusaha.

F. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Ditjen PDSPKP pada Triwulan II Tahun 2023. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan II Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam rangka memberikan pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peran Ditjen PDSPKP serta gambaran kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen PDSPKP, maka dirumuskan visi Ditjen PDSPKP sebagai berikut.

VISI

“Mewujudkan Pengelolaan Perikanan dan Kelautan yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri”

Sejalan dengan visi tersebut, telah dirumuskan misi Ditjen PDSPKP berupa upaya-upaya yang akan ditempuh sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PDSPKP sebagai berikut.

MISI

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui Peningkatan Mutu, Daya Saing dan Penguatan Sistem Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan;
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya lingkup Ditjen PDSPKP.

Tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan antara lain:

1. Meningkatkan investasi dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan, yaitu dengan berbagai upaya untuk :
 - Meningkatkan nilai investasi pada usaha kelautan dan perikanan baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dan *joint venture*, yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kemitraan investasi, jumlah fasilitasi perizinan, ketertarikan terhadap promosi investasi, dan pemanfaatan paket investasi yang disediakan pemerintah.
 - Mengembangkan usaha hasil kelautan dan perikanan melalui pembiayaan lembaga keuangan bank dan bukan bank. Hal ini yang ditunjukkan dengan meningkatnya pelayanan pembiayaan usaha, berkembangnya kemitraan inti plasma dan sejenisnya, meningkatnya penjangkauan akses debitur, pendampingan akses permodalan, pengembangan skema pembiayaan digital (*fintech*), tumbuhnya wirausaha baru, magang calon wirausaha, serta penguatan inkubator bisnis.
2. Memperkuat dan mewujudkan efisiensi kinerja logistik hasil kelautan dan perikanan, yaitu upaya pengembangan aktivitas logistik yang memiliki jaringan/konektivitas yang kuat di pusat produksi, pusat pengumpulan produk, pusat distribusi, dan pasar produk. Hal tersebut ditunjukkan dengan menguatnya struktur ekonomi pelaku logistik produk kelautan dan perikanan, kebutuhan dan ketersediaan produk yang lebih terjamin, sarana penyimpanan dan *buffer stock* hasil kelautan dan perikanan yang berfungsi baik, sistem distribusi dan jasa logistik yang berjalan baik, tata niaga dan pengelolaan koridor logistik yang lebih baik.
3. Memperkuat dan mengembangkan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam dan luar negeri, merupakan upaya untuk :
 - Meningkatkan konsumsi ikan dan penanganan *stunting*, yang ditunjukkan dengan meningkatnya aktivitas transaksi di pasar ikan

modern, pasar ikan bersih, pasar ikan lokal, dan sentra kuliner, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan dan bazar produk perikanan, menyebarnya peta preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri, meningkatnya pemanfaatan alat dan sarana pemasaran ikan yang diberikan oleh pemerintah, berkurangnya penyakit akibat gizi buruk dan protein kurang, dan terjadinya penguatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai sarana;

- Meningkatkan ekspor hasil perikanan, yang ditunjukkan dengan berkembangnya jaringan perdagangan internasional hasil perikanan baik secara bilateral, regional maupun multilateral, dan meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan.
4. Meningkatkan produk kelautan dan perikanan yang bermutu dan bernilai tambah, yaitu berbagai upaya untuk :
- Meningkatkan kapasitas produksi dan penerapan standar mutu baik pada UPI skala menengah besar maupun UPI skala mikro kecil, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku UPI, meningkatnya utilitas UPI, meningkatnya pengurusan sertifikat dan standar mutu pada UPI, dan berkembangnya aktivitas fasilitasi sarana prasarana pengolahan ikan;
 - Meningkatkan perusahaan produk bernilai tambah, yang ditunjukkan dengan berkembangnya UPI bernilai tambah menuju *zero waste*, berkembangnya UPI yang menggunakan teknologi pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta meningkatnya produk-produk inovasi yang bernilai tambah;
 - Menambah kepedulian terhadap kelayakan pengolahan di UPI, yang ditunjukkan dengan terumuskannya standar kelayakan pengolahan hasil perikanan, penerbitan SNI produk kelautan dan perikanan, dan pengurusan SKP secara *online*.
5. Mengembangkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan,

yaitu upaya untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang efektif, bersih dan terpercaya yang ditunjukkan dengan dukungan manajemen yang handal dan terpercaya di lingkungan Ditjen PDSPKP, dukungan sarana dan prasarana internal yang mumpuni, layanan perkantoran yang cepat dan bersih.

Arahan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan pada 4 (empat) bidang tersebut dijelaskan :

1. Meningkatkan investasi dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan (bidang usaha dan investasi). Untuk mencapai tujuan ini, maka kebijakan dapat diarahkan pada :
 - Kebijakan PDSPKP-1 : Peningkatan investasi kelautan dan perikanan
 - Kebijakan PDSPKP-2: Pengembangan usaha kelautan dan perikanan
2. Memperkuat dan mewujudkan efisiensi kinerja logistik hasil Kelautan dan perikanan (bidang logistik). Arahan kebijakannya adalah :
 - Kebijakan PDSPKP-3 : Pengembangan sistem logistik ikan dalam rangka konektivitas dari pusat produksi, pusat pengumpulan ke pusat distribusi/pasar (koridor)
3. Meningkatkan ekspor hasil perikanan (bidang pemasaran). Untuk mencapai tujuan ini, maka kebijakan dapat diarahkan pada :
 - Kebijakan PDSPKP-4 : Fasilitasi dan keikutsertaan Indonesia dalam forum dialog/persidangan skala internasional dan promosi terkait dengan produk perikanan Indonesia di pasar internasional
4. Meningkatkan konsumsi ikan dan penanganan *stunting* (bidang pemasaran). Arahan kebijakannya adalah :
 - Kebijakan PDSPKP-5 : Fasilitasi dan pemberian bantuan pemerintah dan pembinaan kepada pemerintah daerah, masyarakat, kelompok usaha dalam rangka peningkatan konsumsi makan ikan dan pengurangan *stunting* dalam masyarakat

5. Meningkatkan produk kelautan dan perikanan yang bermutu dan bernilai tambah (bidang pengolahan dan bina mutu). Untuk mencapai tujuan ini, maka kebijakan dapat diarahkan pada :
- Kebijakan PDSPKP-6 : Peningkatan kapasitas produksi dan penerapan standar mutu pada UPI skala menengah besar
 - Kebijakan PDSPKP-7 : Peningkatan kapasitas produksi dan penerapan standar mutu pada UPI skala mikro kecil
 - Kebijakan PDSPKP-8 : Pengembangan produk kelautan dan perikanan bernilai tambah
 - Kebijakan PDSPKP-9 : Penerapan standar kelayakan pengolahan di Unit Pengolahan Ikan (UPI)

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sebagai upaya perbaikan perencanaan, Ditjen PDSPKP melakukan reviu terhadap Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pada tahun 2022, masukan dari Sekretariat Jenderal KKP, serta rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KKP.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2023

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	1.	Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing (Juta Ton)	7,35
2	Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Perikanan	2.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	6,77
3	Meningkatnya Konsumsi Ikan Nasional	3.	Konsumsi Ikan (setara utuh segar) (kg/kapita)	57,5
4	Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan	4.	Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	6,10
		5.	Kinerja Logistik Hasil Perikanan (Indeks)	58
		6.	Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp. Triliun)	9,6
		7.	Nilai PNBK Ditjen PDSPKP (Rp. Miliar)	8,65

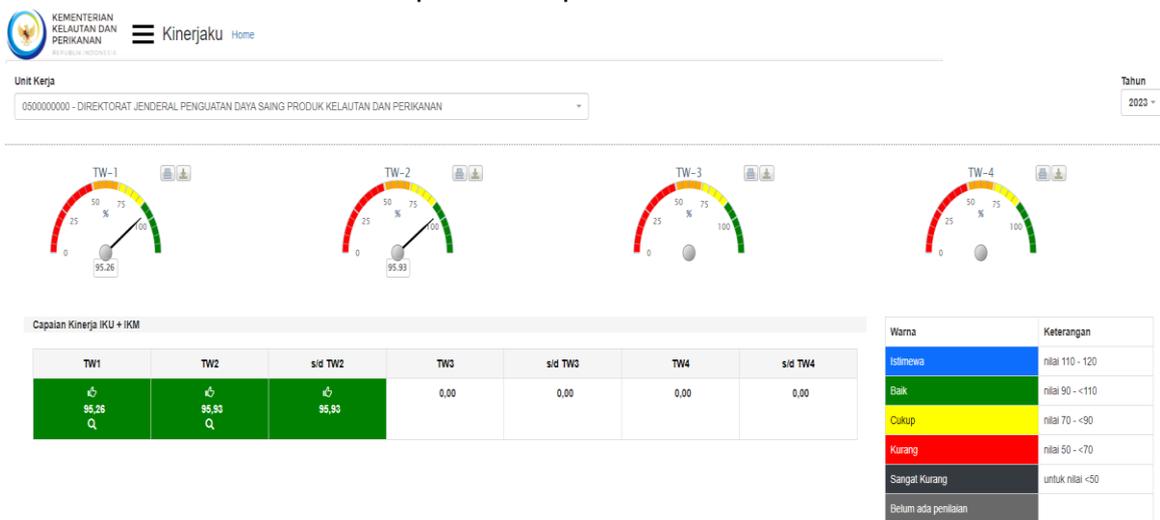
SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
		8.	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (Orang)	49.600
5	Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan meningkat	9.	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (Indeks)	104,25
6	Tatakelola Pemerintahan yang Baik Mendukung Penguatan Daya Saing KP	10.	Nilai PMPRB lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	33,5
		11.	Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP (Unit)	4
		12.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP (Nilai)	3,1
		13.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP (Indeks)	83,2
		14.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	80,5
		15.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	≤0,5
		16.	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP (%)	75
		17.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	75
		18.	Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92
		19.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	89
		20.	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP (Nilai)	86
		21.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	77,5
		22.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	77,5
		23.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	77,5
24.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	90		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Ditjen PDSPKP dari Januari sampai dengan Maret 2023. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara terukur keseluruhan yang bisa diperoleh dari Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). NKO Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 4



Gambar 4. NKO Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2023

Target Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP pada Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Ditjen PDSPKP Periode Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW II 2023	Persentase terhadap Target (%)		
	Tahun 2023	TW II 2023		Tahun 2023	TW II 2023	
1	Volume Produk Olah Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing (Juta Ton)	7,35				
2	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	6,77	3,13	2,69*	39,73	85,94
3	Konsumsi Ikan (setara utuh segar) (kg/kapita)	57,5				
4	Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	6,1	3,18	4,30**	70,49	135,22
5	Kinerja Logistik Hasil Perikanan (Indeks)	58				
6	Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp. Triliun)	9,6	4,32	3,03	31,56	70,14
7	Nilai PNBPD Ditjen PDSPKP (Rp. Miliar)	8,65				
8	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (Orang)	49.600				
9	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (Indeks)	104,25				
10	Nilai PMPRB Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	33,5				
11	Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP (Unit)	4				
12	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP (Nilai)*	3,1				
13	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP (Indeks)	83,2	76	78,71	103,57	94,60
14	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	80,5				
15	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	≤0,5				
16	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	75	75	92,86	123,81	123,81

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW II 2023	Persentase terhadap Target (%)	
	Tahun 2023	TW II 2023		Tahun 2023	TW II 2023
17	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	75			
18	Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92	92	100	108,70
19	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	89	82	81,88	99,85
20	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP (Nilai)	86			
21	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	77,5			
22	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	77,5			
23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	77,5			
24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	90			

*angka sementara

**angka prognosa

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja menjelaskan realisasi indikator kinerja, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen PDSPKP. Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Program 1. Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing

1. Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing

Pengolahan ikan memiliki dua peran dalam produksi perikanan, pertama untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan dan kedua sebagai penyangga atau *buffer* bagi ketersediaan produk perikanan. Permintaan bahan baku usaha pengolahan ikan mempunyai peran menstabilkan harga ikan, baik dari kegiatan penangkapan maupun budidaya, serta mampu menampung produksi terutama pada musim produksi ikan melimpah. Industri perikanan yang berdaya saing tinggi dapat dicirikan oleh terintegrasikannya kegiatan produksi perikanan, baik dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dengan usaha pengolahan hasil perikanan. Jenis kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan dibagi menjadi 10 yaitu : (1) Pengalengan, (2) Pembekuan, (3) Penggaraman/ Pengeringan, (4) Pemindangan, (5) Pengasapan/ Pemanggangan, (6) Fermentasi/Peragian, (7) Pereduksian/ Ekstraksi, (8) Pelumatan Daging/ Surimi, (9) Penanganan Produk Segar/Dingin, dan (10) Pengolahan Lainnya.

Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW II 2022-TW II 2023 (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing (Juta Ton)	7,35	-	7,5	-	-	-	-	-	

Volume produk olahan hasil kelautan dan perikanan berdaya saing ditargetkan sebesar 7,35 juta ton pada tahun 2023. Indikator kinerja dimaksud bersifat tahunan sehingga pencapaiannya tidak dapat dihitung pada triwulan II tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja dimaksud, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp4.439.163.950,- sampai dengan Bulan Juni 2023. Realisasi tersebut setara dengan 31,37% terhadap pagu sebesar Rp13.943.000.000,-.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

- a. Fasilitasi Sertifikasi *Good Manufacturing Practices* (GMP)/Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) sebanyak 1.259 produk;
- b. Pembinaan mutu dan keamanan pangan kepada 400 unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil;
- c. Pembinaan ragam dan nilai tambah produk kepada 250 unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil;
- d. Pembinaan UPI skala menengah dan besar kepada 370 industri;
- e. Penyusunan pedoman pendataan utilitas dan volume produk olahan Unit Pengolahan Ikan skala Menengah dan Besar (VPO UPI MB);
- f. Penyusunan kuesioner pendataan utilitas dan VPO UPI MB;
- g. Pembentukan Enumerator Pendataan Utilitas dan VPO UPI MB;
- h. Sosialisasi Pedoman Pendataan Utilitas dan VPO UPI MB kepada Enumerator;



Gambar 5. Sosialisasi Pedoman Pendataan Utilitas dan VPO UPI MB kepada Enumerator

- i. Pemberian layanan sertifikasi SNI dan pengujian produk kelautan dan perikanan sebagai upaya penjaminan mutu serta peningkatan 22 daya saing produk olahan. Kegiatan layanan sertifikasi SNI

produk kelautan dan perikanan dilaksanakan bagi 11 produk, sedangkan kegiatan pengujian produk kelautan dan perikanan dilaksanakan bagi 145 produk;



Gambar 6. Peta Sebaran Lokasi Penilaian Kesesuaian Produk KP Tahun 2023

- j. Diseminasi diversifikasi produk kelautan dan perikanan telah dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan: (a) Pencetakan media informasi berupa *leaflet* (Inkubasi Bisnis dan Profil BBP3KP) dan panel (Layanan Sertifikasi SNI dan Inkubasi Bisnis Invapro KP), (b) Penyebarluasan informasi melalui 9 (sembilan) *event* di Kab. Bandung, Kab. Maluku Tengah, Kota Jakarta, Kab. Cirebon, Kota Batam, Kota Padang, Kota Sukabumi, dan Kab. Sukabumi dengan total penerima informasi sampai dengan bulan Juni yaitu 676 orang.



Gambar 7. Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan

Sasaran Program 2. Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Perikanan

2. Nilai Ekspor Hasil Perikanan

Nilai ekspor hasil perikanan adalah jumlah komoditas produk perikanan, baik hidup, segar, dingin, maupun olahan yang dikategorikan dalam kode *Harmonized System* (HS) sebanyak 507 kode HS dalam 8 digit yang dijual ke luar negeri yang dikonversi dalam bentuk uang (US Dollar). Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Nilai Ekspor Hasil Perikanan

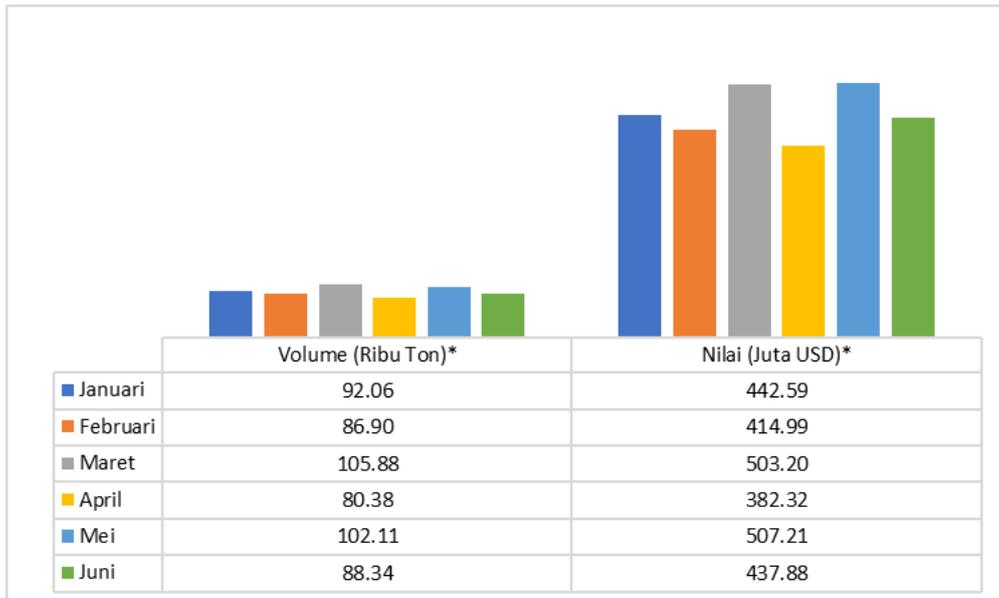
Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW II 2022-TW II 2023 (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	6,77	3,13	8	2,69*	39,73	85,94	33,60	3,06	-12,18

*angka sementara s.d Bulan Juni 2023

Sumber Data: BPS, Juni 2023, diolah Ditjen PDSPKP

Nilai ekspor hasil perikanan Indonesia triwulan II tahun 2023 mencapai USD 2,69 Miliar (angka sementara). Capaian tersebut setara dengan 85,88% terhadap target triwulan II tahun 2023 (USD 3,13 Miliar) atau 39,71% terhadap target tahun 2023 (USD 6,77 Miliar). Jika dibanding target jangka menengah tahun 2024 (USD 8 Miliar), maka capaian ini telah mencapai 33,60%. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2022 yakni USD 3,06 Miliar, maka capaian triwulan II tahun 2023 turun sebesar 12,18%.

Nilai ekspor hasil perikanan triwulan II tahun 2023 berkontribusi sebesar 2,09% terhadap nilai ekspor nasional triwulan II tahun 2023 sebesar USD 128,66 Miliar (angka sementara) atau 2,23% terhadap nilai ekspor non migas triwulan II tahun 2023 yakni sebesar USD 120,82 miliar (angka sementara) (BPS, Juni 2023).



*angka sementara s.d Bulan Juni 2023

Sumber Data: BPS, Juni 2023, diolah Ditjen PDSPKP

Gambar 8. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Triwulan II Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan nilai dan volume ekspor hasil perikanan Bulan Mei 2023, maka baik nilai maupun volume ekspor hasil perikanan Bulan Juni 2023 turun sebesar 13,67% dan 13,48%. Demikian pula jika dibandingkan dengan Bulan Juni 2022, maka nilai dan volume ekspor hasil perikanan Bulan Juni 2023 turun sebesar 17,82% dan 14,04%.

Tabel 5. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Komoditas Utama Triwulan II Tahun 2023

Jenis Komoditas	Volume (Kg)*	%	Nilai (USD)*	%
Udang	110,419,771	19.87	874,533,059	32.53
Tuna-Tongkol-Cakalang	97,018,821	17.46	435,551,344	16.20
Cumi-Sotong-Gurita	60,656,192	10.92	295,768,377	11.00
Rumput Laut	113,766,342	20.47	245,708,030	9.14
Rajungan-Kepiting	14,806,458	2.66	226,538,032	8.43
Lainnya	159,006,055	28.62	610,092,604	22.70
Total	555,673,638		2,688,191,446	

*angka sementara s.d Bulan Juni 2023

Sumber Data: BPS, Juni 2023, diolah Ditjen PDSPKP

Terdapat 5 (lima) jenis komoditas utama ekspor dari Indonesia antara lain udang, tuna-tongkol-cakalang, cumi-sotong-gurita, rumput laut, dan rajungan-kepiting. Selain lima jenis komoditas utama tersebut, terdapat komoditas lainnya meliputi mutiara, tilapia, ikan hias, sarden, kerapu, layur, surimi, hati-telur ikan, dan sebagainya dengan kontribusi 22,70% atau USD 610,09 Juta.

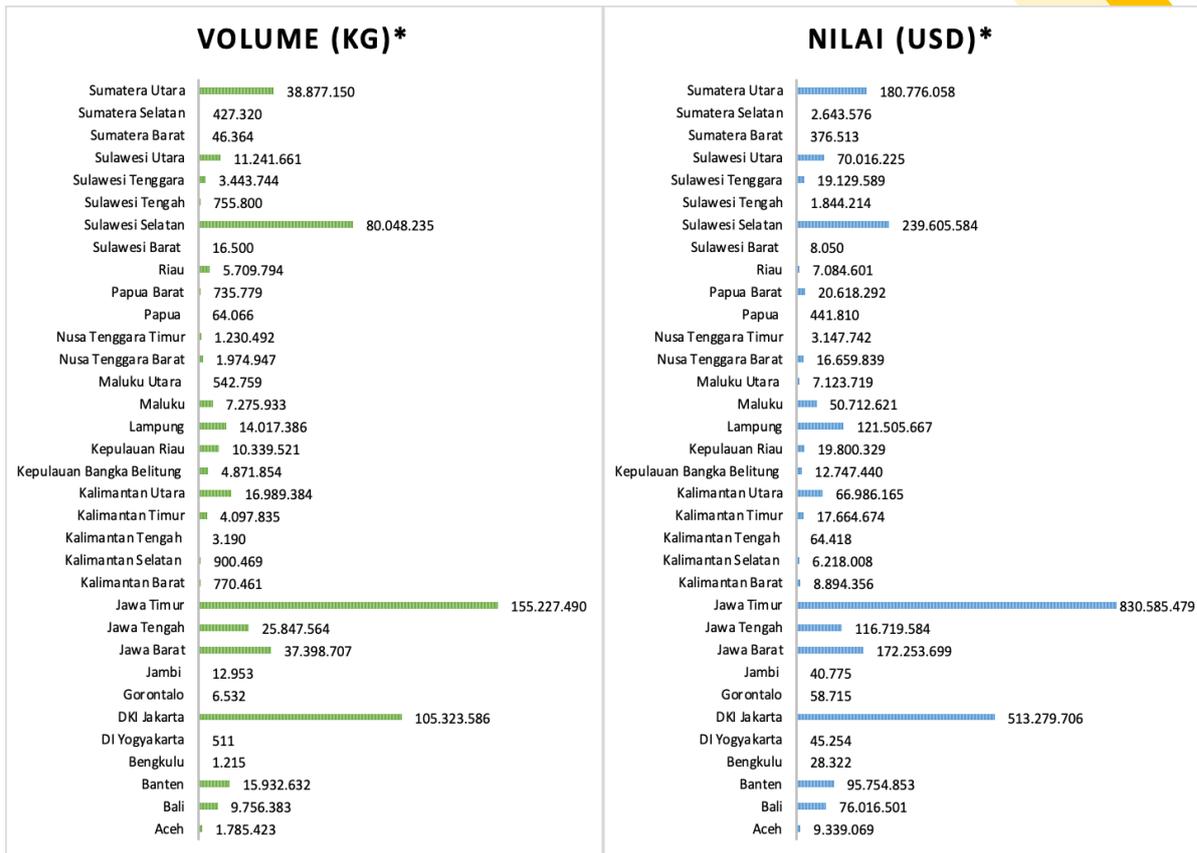
Tabel 6. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor Triwulan II Tahun 2023

Negara Tujuan	Volume (Kg)*	%	Nilai (USD)*	%
United States	106,623,596	19.18	961,354,456	35.76
China	186,018,033	33.48	509,799,935	18.96
Japan	56,606,446	10.19	339,800,728	12.64
ASEAN	96,026,334	17.28	304,786,277	11.34
Uni Eropa	26,628,283	4.79	162,733,221	6.05
Timur Tengah	18,215,865	3.28	38,059,594	2.66
Lainnya	65,555,081	11.80	338,220,570	12.58
Total	555,673,638		2,688,191,446	

*angka sementara s.d Bulan Juni 2023

Sumber Data: BPS, Juni 2023, diolah Ditjen PDSPKP

Berdasarkan negara tujuan, nilai ekspor produk perikanan terbesar berasal dari Amerika Serikat sebesar USD 961,35 Juta (35,76%), China sebesar USD 509,80 Juta (18,96%), Jepang sebesar USD 339,80 Juta (12,64%), ASEAN sebesar USD 304,79 Juta (11,34%), Uni Eropa sebesar USD 162,73 Juta (6,05%), dan Timur Tengah sebesar USD 38,06 Juta (2,66%).



*angka sementara s.d Bulan Juni 2023
 Sumber Data: BPS, Juni 2023, diolah Ditjen PDSPKP

Gambar 9. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Provinsi Asal Triwulan II Tahun 2023

Dari gambar di atas diketahui bahwa terdapat tiga provinsi yang memberikan kontribusi nilai ekspor hasil perikanan terbesar yaitu (1) Provinsi Jawa Timur dengan kontribusi sebesar 30,90%, (2) Provinsi DKI Jakarta dengan kontribusi sebesar 19,09%, dan Provinsi Sulawesi Selatan dengan kontribusi sebesar 8,91%.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target nilai ekspor hasil perikanan triwulan II tahun 2023 antara lain :

- a. Penurunan permintaan impor produk perikanan di pasar Amerika Serikat sebagai salah satu negara tujuan ekspor produk perikanan utama Indonesia. Berdasarkan *IMF World Economic Outlook April 2023*, Amerika Serikat diperkirakan ekonominya melambat dari 2,1% (2022) menjadi 1,6% (2023);
- b. Perlambatan ekonomi yang terjadi di negara-negara utama tujuan ekspor produk perikanan seperti di Amerika Serikat telah mempengaruhi daya beli masyarakat. Sebagai contoh, total nilai

impur produk perikanan di Amerika Serikat hingga April 2023 mengalami penurunan sebesar 19,67% dari USD 11,08 Miliar pada tahun 2022 menjadi USD 8,90 Miliar pada tahun 2023. Beberapa komoditas utama yang berkontribusi terhadap penurunan impor tersebut dan merupakan komoditas utama ekspor Indonesia ke Amerika Serikat antara lain:

- Udang mengalami penurunan sebesar USD 914 Juta (-30,87%);
 - Rajungan-kepiting mengalami penurunan sebesar USD 766 Juta (-63,35%);
 - Tuna-Cakalang-Tongkol mengalami penurunan sebesar USD 102 juta (-12,91%)(YoY);
 - Tilapia mengalami penurunan sebesar USD 55 juta (-18,52%)(YoY);
 - Cumi-Sotong-Gurita mengalami penurunan sebesar USD 134 juta (-40,91%) (YoY).
- c. Diversifikasi pasar produk ekspor belum optimal dikarenakan adanya hambatan ekspor di beberapa negara tujuan baik tarif maupun non tarif (SPS dan TBT). Beberapa kendala ekspor non-tarif antara lain adanya hambatan registrasi dan penambahan eksportir terdaftar di negara tujuan ekspor antara lain Uni Eropa, Rusia, RRT, Arab Saudi, Chili dan Brazil.

Adapun rencana tindak lanjut kedepan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian nilai ekspor hasil perikanan, antara lain :

- a. Menyelesaikan potensi hambatan ekspor di Amerika Serikat melalui pemenuhan Persyaratan Sertifikasi Udang Tangkapan Amerika Serikat melalui penyampaian tanggapan *additional information* kepada pihak US. *Department of State* dan penyampaian dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam proses sertifikasi tersebut;
- b. Mempercepat penyelesaian peningkatan akses pasar di Jepang, melalui percepatan penyelesaian perundingan IJEPA untuk produk perikanan;

- c. Melakukan sinergitas dan kerjasama dengan BPOM dalam rangka pelaksanaan eksportasi ikan dan olahan ikan ke Kerajaan Arab Saudi;
- d. Melakukan persiapan dan perumusan posisi dan strategi perundingan *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity* (IPEF) dalam rangka peningkatan akses pasar produk perikanan;
- e. Fasilitasi keikutsertaan dalam pameran *seafood* skala internasional khususnya *World Seafood Shanghai Exhibition*;
- f. Penyelenggaraan *Foreign Buyer Mission* produk *seafood* di Indonesia.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran untuk pencapaian indikator kinerja nilai ekspor hasil perikanan sebesar Rp13.925.000.000,- dan pada triwulan II tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp8.882.951.775,-. Realisasi anggaran ini setara dengan 63,79% terhadap total pagu anggaran.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini yang juga sekaligus sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi atas permasalahan di Triwulan I Tahun 2023, antara lain:

- a. Keikutsertaan dalam *Safood Expo Global* (SEG) 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 April 2023 di Fira Barcelona, Barcelona, Spanyol, dan merupakan pameran *seafood* terbesar di dunia dengan peserta berasal lebih dari 77 negara dan dihadiri lebih dari 29.000 pengunjung termasuk importir, *processor*, *wholesaler*, distributor, *catering*, dan *food service*. Selama pameran berlangsung, nilai transaksi potensial yang dihasilkan sebesar USD 54.64 juta dengan produk yang diminati oleh *buyers* antara lain: tuna, gurita, cumi-cumi, sotong, udang, kakap merah, kakap putih, marlin, kerapu, tilapia, mahi-mahi, ikan sarden kaleng, ikan tuna kaleng, *kingfish*, *parrot fish*, *swordfish*, *wahoo*, *ribbon fish*, dan ikan lainnya. Para calon *buyers* potensial antara lain berasal dari: Taiwan, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, Spanyol, Australia, China, Peru, Panama, Kanada, Jerman, Ekuador, Hongkong, Meksiko, India, Korea

Selatan, Belanda, Kolombia, Turki, Jepang, Perancis, Malta, Puerto Rico, Jepang, Belgia, Polandia, Vietnam, Bermuda dan Persatuan Emirat Arab;

- b. Melakukan konsultasi dengan *US. Department of State*, *US. NOAA* dan *US Embassy* Jakarta dalam rangka pemenuhan persyaratan undang tangkapan laut pada tanggal 14 April 2023;
- c. Melakukan sosialisasi Bursa Ikan dalam rangka peningkatan akses pasar produk perikanan berbasis elektronik melalui media digital di Provinsi Lampung tanggal 10 Mei 2023;
- d. Melakukan pertemuan Lintas Eselon I dengan pembahasan tentang Persyaratan Ekspor Udang Tangkapan ke Amerika Serikat tanggal 8-9 Juni 2023;
- e. Melakukan Persiapan Pertemuan dengan *Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries* of Japan tanggal 22 Juni 2023.



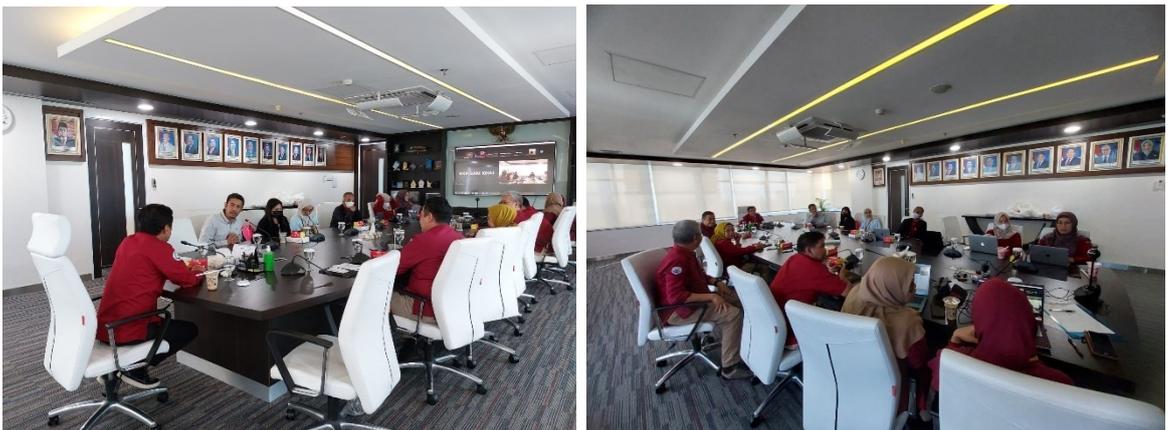
Gambar 10. Keikutsertaan KKP dalam *Seafood Expo Global (SEG) 2023* di Barcelona, Spanyol tanggal 25-27 April 2023



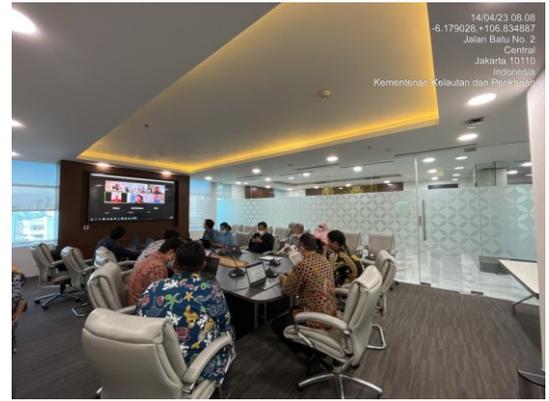
Gambar 11. Sosialisasi Bursa Ikan di Provinsi Lampung pada tanggal 10 Mei 2023



Gambar 12. Pertemuan Lintas Eselon I Terkait Persyaratan Ekspor Udang Tangkapan ke Amerika Serikat tanggal 8-9 Juni 2023 di Serpong



Gambar 13. Persiapan Pertemuan dengan *Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries of Japan* tanggal 22 Juni 2023



Gambar 14. Pertemuan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan US Department of State terkait Sertifikasi Udang Tangkapan Amerika Serikat tanggal 14 April 2023

Sasaran Program 3. Meningkatnya Konsumsi Ikan Nasional

3. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan adalah jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan neraca permintaan ikan untuk konsumsi domestik. Ikan mencakup ikan segar dan olahan sesuai dengan ketentuan dari BPS.

Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Konsumsi Ikan

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW II 2022-TW II 2023 (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Konsumsi Ikan (setara utuh segar) (kg/kapita)	57,5	-	62,5	-	-	-	-	-	

Konsumsi ikan tahun 2023 ditargetkan sebesar 57,5 kg/kapita. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan II tahun 2023.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Konsumsi Ikan sebesar Rp59.047.632.000,- dan pada Triwulan II tahun 2023 telah direalisasikan sebesar Rp24.435.662.926,-. Realisasi anggaran ini setara dengan 41,38% terhadap total pagu anggaran.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini yang juga sekaligus sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi atas permasalahan di Triwulan I Tahun 2023, antara lain:

- a. Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang diselenggarakan sebanyak 95 promosi, terdiri dari kegiatan Perluasan Safari Gemarikan dalam rangka pencegahan *stunting* gizi buruk (75 promosi), *Talkshow* CNBC (1 promosi), *Jurnalist Fest* (1 promosi), *Nautica Fest* (1 promosi), Bazar Bappenas (1 promosi), Bazar UMKM *Thrive* (1 promosi), Bazar Produk Perikanan KKP (6 promosi), Bazar Jurnalis Fest Depok (1 promosi), Pameran IISM Jiexpo (1 promosi), Promosi Media Sosial (6 promosi), Promosi Aplikasi Gemarikan (1 promosi);
- b. Rapat Koordinasi persiapan *Road to* BBI dan BBWI 2023 di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulteng yang diikuti wakil dari KKP, ESDM, Pemprov Sulawesi Tengah, dan BI;
- c. Pembinaan, pemanfaatan dan pengelolaan pasar ikan yang telah dilaksanakan sebanyak 53 lembaga yaitu PIB Kab. Bone Bolango, PIB Kab. Buru, PIB Kota Prabumulih, PIB Kab. Probolinggo, PIB Kab. Aceh Utara, PIB Kota Sorong, PIB Kota Padang, PIB Kab. Kutai Timur, PIB Kab. Maluku Tengah, PIB Kab. Jembrana, PIB Kab. Manggarai Barat, PIB Kab. Banyuwangi, PIB Kab. Sampang, PIB Kab. Lebak, PIB Kab. Mamuju Tengah, PIM Muara Baru Kota Jakarta Utara, Senkul Kab. garut, Senkul Kab. Sambas, Senkul Kab. Lampung Selatan, PIM Soreang Kab. Bandung, Pasar Ikan Konsumsi Kab. Purbalingga, Senkul Kab. Sabang, Senkul Surabaya, Senkul Kab. Singkawang, Senkul Kab. Prabumulih, Senkul Kab. Pekalongan, Senkul Kota Palembang, Senkul Mataram, Senkul Manado, Senkul Makassar, Senkul Bengkulu, Senkul Bau-Bau, Senkul Tanggamus, Senkul Sumedang, Senkul Raja Ampat, Senkul Pesisir Selatan, Senkul Sangihe, Senkul Morotai, Senkul Jombang, Senkul Cirebon, Senkul Bulukumba, Senkul Bondowoso, Senkul Belitung, Senkul Bantaeng, Senkul Bangka Selatan, Senkul Aceh

Selatan, PIM Palembang, PIB Pinrang, PIB Muna, PIB Sula, PIB Boyolali, Pasar Kuliner dan Sentra Promosi Produk KP Purwakarta dan Pasar Ikan Mayangan;

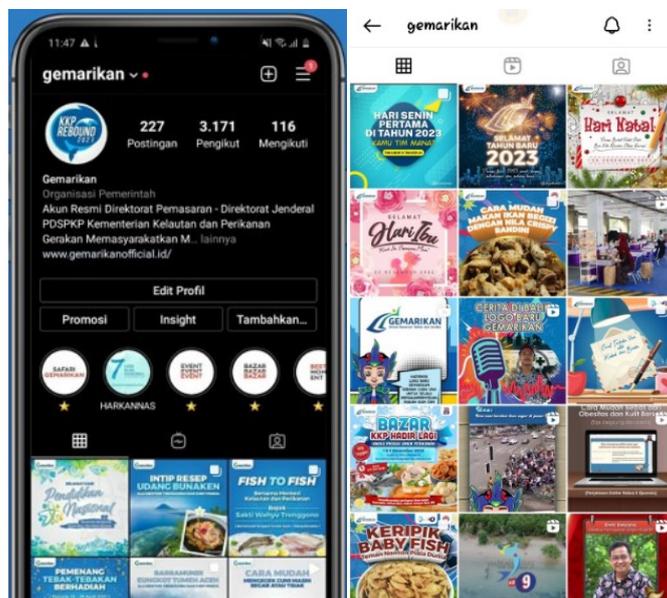
- d. Progres pengadaan bantuan pemerintah peralatan pemasaran (*coolbox*) sampai dengan bulan Juni yaitu; penetapan penerima tahap I sejumlah 1501 unit untuk 116 kelompok serta dalam proses rekapitulasi data penerima Tahap II;
- e. Progres pencapaian kegiatan pengadaan Kendaraan Pemasaran ATI sampai dengan bulan Juni 2023 adalah dalam proses negosiasi dengan calon penyedia Mobil ATI agar harga tayang yang tertera pada e-Katalog sektoral sudah termasuk sarana pendukung serta melakukan pendampingan kepada calon penerima Mobil ATI di Magelang terkait perubahan bentuk kelompok dari semula Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) menjadi Koperasi;
- f. Kegiatan Pelatihan UMKM BBI-BBWI Sulteng 2023 bersama GOJEK dengan Judul “Ayo Optimalkan Medsosmu” kepada Pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) di Kota Palu dan Binaan KKP.



Gambar 15. Safari Gemarikan di Lampung Selatan pada Tanggal 20 Mei 2023



Gambar 16. Safari Gemarikan di Kab. Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah pada Tanggal 16 Juni 2023



Gambar 17. Promosi/Kampanye melalui Media Sosial Gemarikan Tahun 2023

Sasaran Program 4. Terwujudnya pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel, dan Berkelanjutan

4. Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan

Investasi di sektor kelautan dan perikanan (KP) didefinisikan sebagai tindakan penanaman modal usaha di sektor KP dengan tujuan mendapatkan profit atau keuntungan. Realisasi investasi kelautan dan perikanan merupakan realisasi investasi usaha perikanan (penangkapan dan budidaya), pengolahan dan perdagangan/pemasaran. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) selalu berupaya untuk mendorong peningkatan realisasi investasi melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain penyediaan informasi peluang investasi, promosi investasi, pendampingan, pemantauan dan pengendalian investasi. Kegiatan promosi usaha dan investasi dalam rangka mendukung program prioritas KKP yaitu Kampung Budidaya, peningkatan produksi udang, dan Penangkapan Ikan Terukur. Selain itu untuk mendukung program peningkatan nilai ekspor hasil perikanan dalam rangka penguatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

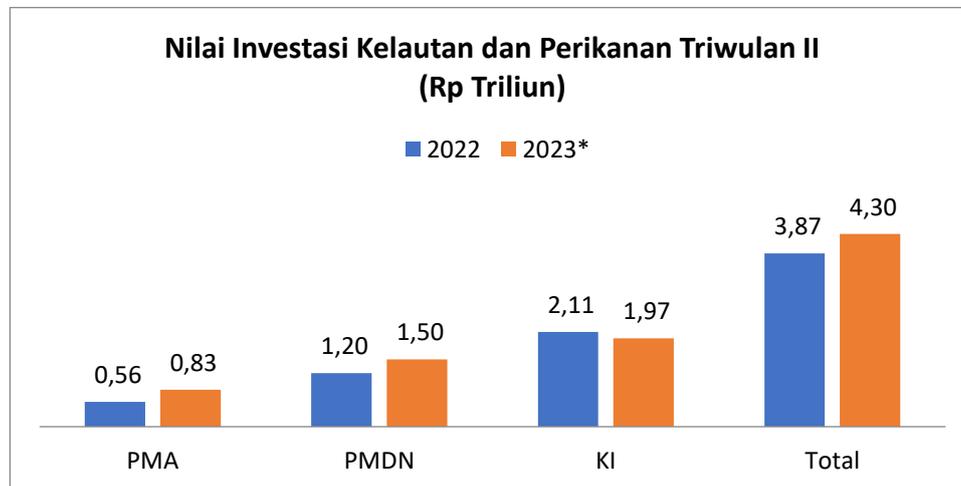
Realisasi investasi KP dihitung melalui penjumlahan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bersumber dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Kredit Investasi yang bersumber dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Investasi yang berasal dari PMA dan PMDN merupakan kontribusi perusahaan swasta, baik dalam negeri maupun asing terhadap pembangunan kelautan dan perikanan. Sedangkan investasi dari kredit investasi merupakan kredit jangka menengah/panjang yang berasal dari Lembaga Keuangan (perbankan dan non perbankan). Realisasi dari kredit investasi mengakomodir investasi masyarakat yang berasal dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW II 2022-TW II 2023 (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp Triliun)	6,1	3,18	6,43	4,30*	70,49	135,22	66,87	4,04	6,44

*angka prognosa

Realisasi nilai investasi KP pada triwulan II tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp4,30 Triliun. Capaian ini setara dengan 70,49% terhadap target tahun 2023 yakni Rp6,1 Triliun atau setara dengan 135,22% terhadap target triwulan II tahun 2023 sebesar Rp3,18 Triliun. Nilai investasi KP pada triwulan II tahun 2023 juga setara 66,87% terhadap target jangka menengah tahun 2024 sebesar Rp6,43 Triliun. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2022 yakni sebesar Rp4,04 Triliun, maka realisasi investasi triwulan II tahun 2023 diperkirakan naik sebesar 6,44%, angka ini masih merupakan angka perkiraan.



*angka prognosa

Gambar 18. Angka Perkiraan Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Sumber Permodalan Periode Triwulan II Tahun 2022-2023 (Rp Triliun)

Realisasi investasi yang bersumber dari PMA dan PMDN pada triwulan II tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp 2,33 triliun atau tumbuh 32,98% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp 1,75

triliun. Realisasi Kredit Investasi pada triwulan II tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp 1,97 triliun atau turun 6,70% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp 2,11 triliun.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran melalui APBN sebesar Rp4.009.981.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp970.183.456,- (24,19%). Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Ditjen PDSPKP dalam rangka mendukung pencapaian nilai investasi kelautan dan perikanan sebagai berikut:

- a. Pemetaan peluang investasi
 - a. *Benchmarking* industri pengolahan udang di Sidoarjo, Jawa Timur pada tanggal 3-5 Mei 2023;
 - b. Survei dan FGD penyusunan peluang investasi industri pengolahan udang di Kabupaten Kebumen;
 - c. Finalisasi laporan kegiatan Penyusunan Dokumen Peluang Investasi Industri Pengolahan Udang Terintegrasi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah;
 - d. Pemetaan peluang investasi usaha rumput laut di Kabupaten Wakatobi.
- b. Promosi investasi
 - a. Koordinasi percepatan hilirisasi usaha rumput laut di Kabupaten Wakatobi;
 - b. Koordinasi persiapan Pekan Usaha dan Investasi dalam rangka mendukung Festival Kuliner Ikan Keraton Nusantara di Solo.



Gambar 19. Kegiatan *Benchmarking* Industri Pengolahan Udang di Sidoarjo, Jawa Timur



Gambar 20. Kegiatan Survei dan FGD Penyusunan Peluang Investasi Industri Pengolahan Udang di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah



Gambar 21. Kegiatan Pendampingan Investasi Rumput Laut Kepada PT Sea Six Energy dan PT Regenerasi Kehidupan Nusantara (RKN) di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara

5. Kinerja Logistik Hasil Perikanan

Penghitungan Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI) diperlukan untuk mengukur performa dari sistem logistik ikan di suatu koridor yang ditentukan. Angka capaian IKLI berfungsi sebagai sarana evaluasi kinerja sistem logistik ikan yang telah berjalan berdasarkan dimensi pembentuknya. Penghitungan IKLI menggunakan data primer berupa hasil wawancara dengan instrumen kuesioner kepada instansi terkait, pelaku jasa logistik, dan pelaku pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Saat ini, penghitungan IKLI berdasarkan pada moda transportasi laut. Penilaian IKLI tahun 2023 dilakukan pada 6 koridor logistik, yaitu:

1. Bitung – Surabaya/Jakarta
2. Kupang – Surabaya/Jakarta
3. Kendari – Surabaya/Jakarta
4. Mimika – Surabaya/Jakarta

5. Ambon – Surabaya/Jakarta
6. Makassar – Surabaya/Jakarta

Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Logistik Hasil Perikanan

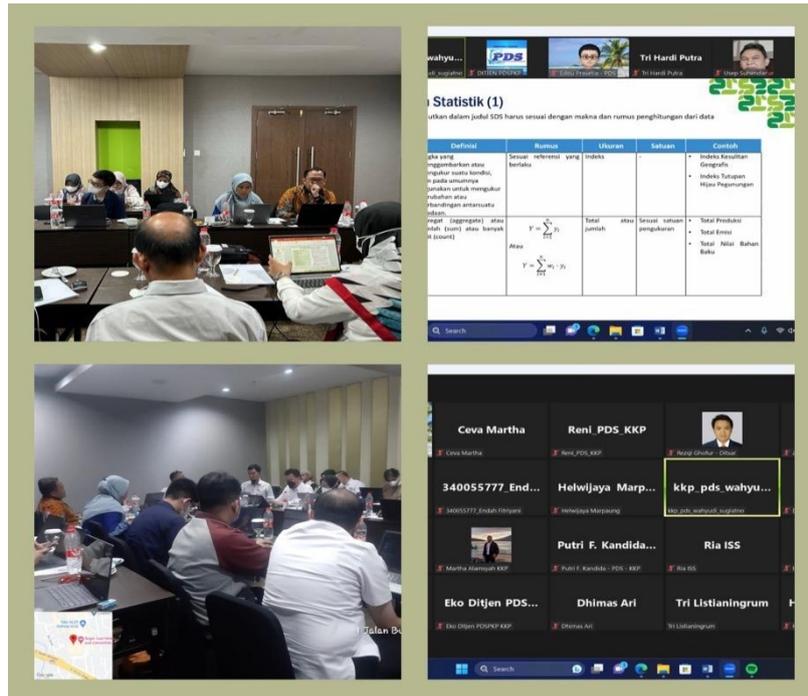
Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW II 2022-TW II 2023 (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Kinerja Logistik Hasil Perikanan (Indeks)	58	-	60	-	-	-	-	-	-

Kinerja logistik hasil perikanan tahun 2023 ditargetkan sebesar 58. Indikator ini bersifat tahunan sehingga capaian tidak dapat dihitung pada triwulan II tahun 2023.

Kegiatan yang telah dilaksanakan Ditjen PDSPKP dalam rangka pencapaian IKLI selama TW II tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Permohonan perubahan anggota tim penghitungan Indeks Kinerja Logistik Ikan tahun 2023 yang berasal dari lingkup Direktorat Logistik dan perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Kabupaten Mimika, serta penyusunan draft SK tim penghitungan Indeks Kinerja Logistik Ikan tahun 2023;
2. *Workshop* penyusunan meta data Indeks Kinerja Logistik Ikan 24 – 26 Mei 2023 di Bogor

Pagu anggaran untuk kegiatan Penghitungan Indeks Kinerja Logistik adalah sebesar Rp 382.026.000,- dengan realisasi pada TW II adalah sebesar Rp 28.406.284 atau sebesar 7,44% dari pagu.



Gambar 22. Workshop Penyusunan Metadata Indeks Kinerja Logistik Ikan 24 – 26 Mei 2023 di Bogor

6. Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program

Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program menunjukkan jumlah realisasi pembiayaan kredit program yang disalurkan oleh lembaga perbankan dan lembaga keuangan bukan bank (nonbank) kepada UMKM kelautan dan perikanan (KP). Ditjen PDSPKP terus berupaya mendorong peningkatan nilai pembiayaan usaha KP dengan melakukan pemantauan penyaluran kredit program dari perbankan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan pembiayaan dari lembaga keuangan nonbank yaitu pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang disalurkan oleh Holding Ultra Mikro, salah satunya yaitu PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Mekaar. Berbagai kegiatan strategis dilakukan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha KP, diantaranya fasilitasi akses pembiayaan melalui pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) baik di pusat maupun daerah, pendampingan usaha, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyaluran kredit program.

Tabel 10. Ikhtisar Pencapaian Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW II 2022-TW II 2023 (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program (Rp Triliun)	9,6	4,32	7,05	3,04	31,56	70,13	43,12	4,92	-38,29

Sumber : SIKP, Kemenkeu dan PT. PNM, Juni 2023, diolah Ditjen PDSPKP

Tabel 11. Rincian Pembiayaan Kredit Program di Sektor Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2023

Sumber Pembiayaan	Nilai (Rp)	Debitur (Pelaku Usaha)	Persentase terhadap Total Nilai (%)
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	2.714.151.157.012	53.389	89
Ultra Mikro (UMi)	322.202.000.000	59.776	11
Total	3.036.353.157.012	113.165	100

Sumber : SIKP, Kemenkeu dan PT. PNM, Juni 2023, diolah Ditjen PDSPKP



Sumber : SIKP, Kemenkeu dan PT. PNM, Juni 2023, diolah Ditjen PDSPKP

Gambar 23. Realisasi Pembiayaan Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2023

Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program pada triwulan II tahun 2023 mencapai Rp3,04 Triliun yang disalurkan kepada 113.165 pelaku usaha KP. Capaian ini setara dengan 70,13% terhadap target triwulan II tahun 2023 sebesar Rp4,32 Triliun atau setara dengan 31,56% terhadap target tahun 2023 sebesar Rp9,6 Triliun. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 (Rp7,05 Triliun) maka capaian triwulan II tahun 2023 telah mencapai 43,12%.

Jika dibandingkan dengan pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program pada triwulan II tahun 2022, maka

capaian triwulan II tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 38,29%. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan kebijakan KUR tahun 2023 yang ditetapkan dalam Permenko Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023. Dengan adanya kebijakan baru tersebut, Lembaga Keuangan Penyalur KUR perlu melakukan penyesuaian sistem dalam penyaluran pembiayaannya. Adapun perubahan kebijakan dimaksud yaitu:

- a. Kebijakan KUR kembali ke masa sebelum Pandemi Covid 2019, yaitu suku bunga 6% tanpa tambahan subsidi bunga 3%, target penyaluran KUR di sektor produksi (termasuk sektor KP) kembali ditetapkan sebesar 60%, kembalinya total akumulasi plafon KUR Kecil maksimal Rp500 juta dan memperpanjang kebijakan restrukturisasi KUR s.d. 31 Maret 2024;
- b. Kebijakan KUR mendorong graduasi debitur, dimana terdapat penurunan suku bunga KUR Super Mikro menjadi 3%, pembatasan maksimal akses KUR Mikro sebanyak 4 kali untuk sektor produksi (termasuk sektor KP), dan kenaikan suku bunga berjenjang untuk debitur KUR Mikro dan KUR Kecil berulang;
- c. Kebijakan KUR untuk Memperluas Penyaluran dan Mendorong Peningkatan Debitur KUR, diantaranya penegasan pelaksanaan KUR tanpa agunan tambahan untuk plafon KUR s.d. Rp100 juta dan penambahan target debitur baru dan target debitur graduasi penyaluran KUR dengan plafon KUR tahun 2023 sebesar Rp450 triliun atau plafon sesuai kecukupan APBN 2023;
- d. Kebijakan KUR yang mengatur tentang pembayaran subsidi bunga KUR belum terbit, hal ini membuat lembaga keuangan penyalur KUR masih menahan dan lebih selektif dalam penyaluran KUR.

Dengan adanya perubahan kebijakan tersebut, Ditjen PDSPKP terus melakukan Upaya dalam rangka mendorong pencapaian nilai pembiayaan usaha KP diantaranya :

- a. Pembinaan, pendampingan dan monitoring Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan (TPU KP) sebanyak 81 personil yang tersebar di 74 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi;

- b. Edukasi dan sosialisasi literasi keuangan melalui pelaksanaan bimbingan teknis kewirausahaan dan akses pembiayaan bekerja sama dengan mitra Komisi IV DPR RI bagi pelaku usaha KP di 8 lokasi yakni di Kabupaten/Kota Sumedang, Cilacap, Jombang, Tulang Bawang Barat, Merauke, Kupang dan Purwakarta.

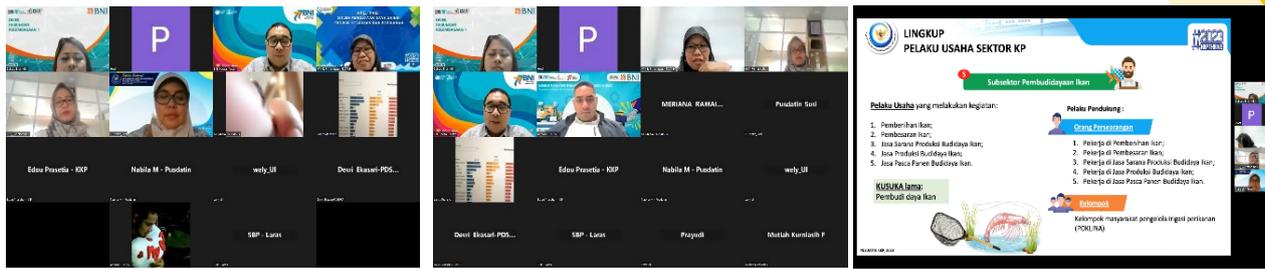
Pada tahun 2023, Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program sebesar Rp3.436.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp1.356.248.002 atau setara dengan 39,47%.

Pada tahun 2023, Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian nilai pembiayaan usaha KP melalui kredit program antara lain :

- a. Pembinaan dan monitoring kepada tenaga pendamping usaha kelautan dan perikanan secara berkala. Sampai dengan triwulan II 2023, TPUKP telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp11,76 milyar kepada 256 pelaku usaha;
- b. Identifikasi dan verifikasi calon debitur potensial dalam rangka persiapan kegiatan fasilitasi akses permodalan di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Kebumen;
- c. Pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan secara berkala melalui program GISELA.



Gambar 24. Pembinaan dan Monitoring Kepada Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan Secara Berkala



Gambar 25. Koordinasi dengan PUSDATIN dan Lembaga Keuangan Dalam Rangka Pemenuhan Data Calon Debitur Potensial Kepada SIKP

7. Nilai PNBP Ditjen PDSPKP

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Tabel 12. Ikhtisar Pencapaian Nilai PNBP Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW II 2022-TW II 2023 (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Nilai PNBP Ditjen PDSPKP (Rp Miliar)	8,63	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2023, nilai PNBP Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar Rp8,63 Miliar. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya tidak dilakukan pengukuran pada triwulan II tahun 2023. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam Renstra BBP3KP Tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan target jangka menengah tahun 2024.

Berdasarkan Aplikasi Omspan Kemenkeu diketahui terdapat capaian nilai PNBP sampai dengan Triwulan II sebesar Rp7.146.227.801,- yang bersumber dari :

Tabel 13. Rekapitulasi PNBP Ditjen PDSPKP Sampai dengan Triwulan II tahun 2023

No	Kode Akun Jenis Pendapatan	Realisasi
1	425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2.324.230.755
2	425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	151.498.323
3	425131 Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	2.528.763.033
4	425132 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	705.432.085
5	425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	214.208.018
6	425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	99.626.217
7	425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	336.118.634
8	425289 Pendapatan Pengujian Sertifikasi Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya	95.110.000
9	425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	591.272.136
10	425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	99.968.600
Total		7.146.227.801

Indikator Kinerja Nilai PNBP Ditjen PDSPKP merupakan Indikator yang bersifat tahunan sehingga tidak dilakukan pengukuran di dalam SAPK pada Triwulan II tahun 2023.

Pada tahun 2023, Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian nilai PNBP Ditjen PDSPKP antara lain :

- a. Menghadiri Pembahasan Tata Kelola Mekanisme Pascaproduksi dan Road Map SDA Perikanan dengan DJA pada tanggal 13 April 2023. Kegiatan tersebut membahas Mekanisme Pascaproduksi dari Direktorat Logistik Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. Rapat Pembahasan langkah-langkah percepatan optimalisasi PNBP pada tanggal 5 Juni 2023. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan Pengisian matriks langkah-langkah percepatan optimalisasi PNBP Tahun 2023 Kementerian Kelautan dan Perikanan; Pembahasan data dukung penggunaan PNBP (KAK, TOR). Pengisian tersebut menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Keuangan No. 873/SJ.2/KU.340/V/2023 tanggal 26 Mei 2023;
- c. Menghadiri Rapat Exposure Data dan Informasi yang diadakan oleh biro Keuangan pada tanggal 5 hingga 10 Juli 2023. Rapat tersebut membahas Data dan Informasi dalam Rangka Perencanaan

Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Kepatuhan pada Pengelolaan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2022-2023 (Semester I) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- d. Menghadiri Monitoring dan Evaluasi PNBPKP dan BLU KKP pada tanggal 13 April, 23 Mei, dan 22 Juni 2023. Monitoring dan Evaluasi PNBPKP dan BLU KKP membahas mengenai permintaan data Penerimaan PNBPKP, PNBPKP tarif 0, Proyeksi Penerimaan PNBPKP, dan data terkait PNBPKP lainnya per bulannya.

8. Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik baik dibidang logistik hasil kelautan dan perikanan, pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pemasaran hasil kelautan dan perikanan, usaha dan investasi dan pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan.

Tabel 14. Ikhtisar Pencapaian Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW II 2022-TW II 2023 (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (Orang)	49.600	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2023, tenaga kerja yang terlibat bidang PDSPKP ditargetkan sebesar 49.600 orang. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya tidak dihitung pada triwulan II tahun 2023. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Sasaran 5. Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan Meningkat

9. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)

Secara konseptual nilai tukar pengolah hasil perikanan adalah pengukur kemampuan tukar produk olahan hasil perikanan yang dihasilkan pengolah hasil perikanan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam proses produksi pengolahan hasil perikanan. Dari angka NTPHP dapat pula diketahui tingkat daya saing suatu produk olahan hasil perikanan dibandingkan dengan produk lain, sehingga arah pengembangan kebijakan pada spesialisasi produk unggulan wilayah yang berkualitas dapat dilakukan.

NTPHP merupakan perbandingan indeks harga yang diterima rumah tangga pengolah hasil perikanan dengan indeks harga yang dibayar rumah tangga pengolah hasil perikanan.

NTPHP dihitung berdasar *sampling* yang akan dilakukan di 40 Kabupaten/Kota yang tersebar di 5 Provinsi. Lokasi yang menjadi *sampling* dipilih berdasarkan kesepakatan antara Ditjen PDSPKP dengan Badan Pusat Statistik (BPS) saat pengambilan tahun dasar untuk perhitungan NTPHP di tahun 2015. Beberapa pertimbangan dalam pengambilan keputusan tersebut adalah banyaknya jumlah UPI terutama skala mikro dan kecil dan variasi jenis kegiatan pengolahan ikan pada kelima provinsi tersebut sehingga dapat mewakili seluruh provinsi di Indonesia.



Gambar 26. Lokasi Sampling Perhitungan NTPHP

Tabel 15. Ikhtisar Pencapaian Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW II 2022-TW II 2023 (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (Nilai)	104,25	-	104,75	-	-	-	-	-	-

Target Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) tahun 2023 adalah sebesar 104,25. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya tidak dapat dihitung pada triwulan II tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1.222.659.944,- sampai dengan Bulan Juni 2023. Realisasi ini setara dengan 2,82% terhadap pagu anggaran sebesar Rp43.527.745.000,-.

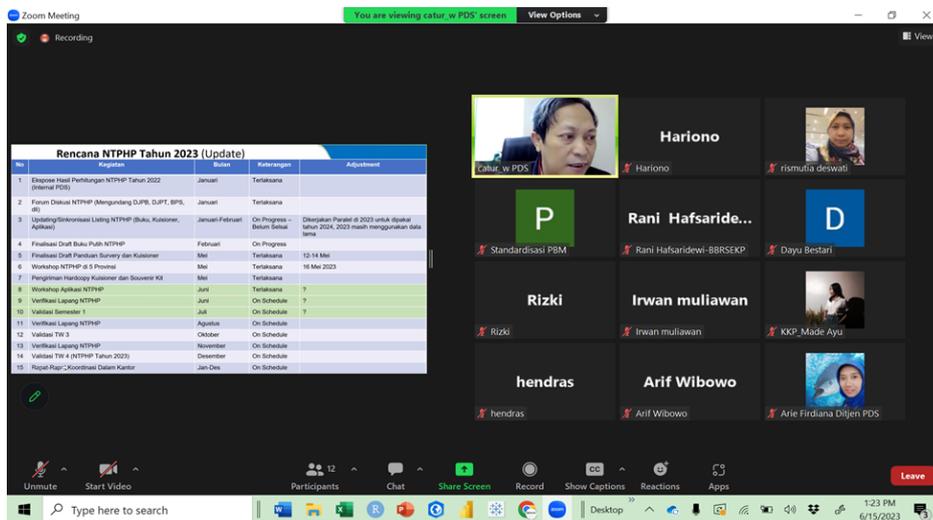
Pada tahun 2023, Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk mencapai indikator kinerja dimaksud antara lain:

- Koordinasi Data NTPHP tahun 2023 yang terdiri dari Tim Pusat pada Tanggal 17 April 2023 di RR Akses Pasar, GMB 3 Lt 15- KKP;
- Persiapan Materi *Workshop* NTPHP pada tanggal 12-14 Mei 2023 di Savero Style Hotel Bogor;

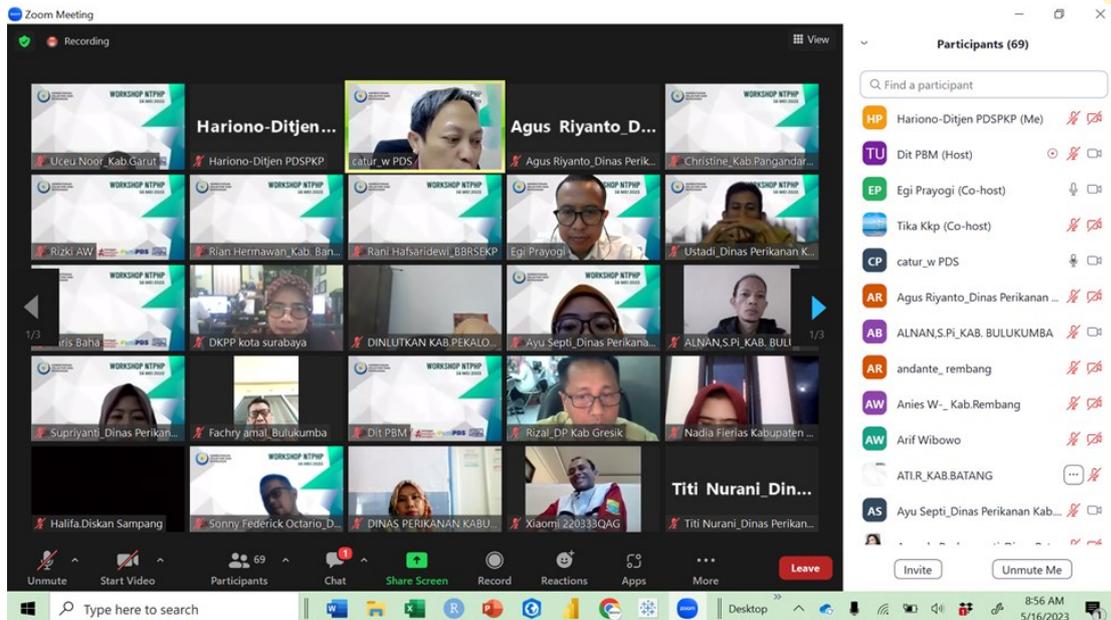
- c. *Workshop* NTPHP dilakukan secara *hybrid* yaitu di Ruang Rapat Investasi, GMB 3 Lt 15 (tim NTPHP Pusat) dan melalui *zoom meeting* (Tim NTPHP Daerah) pada tanggal 16 Mei 2023;
- d. Persiapan *Workshop* Aplikasi NTPHP Tahun 2023 pada pada tanggal 15 Juni 2023 secara *online* pada tanggal 15 Juni 2023



Gambar 27. Persiapan Materi *Workshop* NTPHP



Gambar 28. Persiapan *Workshop* Aplikasi NTPHP



Gambar 29. Pelaksanaan Workshop NTPHP

Sasaran 6. Tatakelola Pemerintahan yang Baik Mendukung Penguatan Daya Saing KP

10. Nilai PMPRB Lingkup Ditjen PDSPKP

Reformasi birokrasi yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang pelaksanaannya dilakukan melalui program-program yang meliputi: (1) Manajemen Perubahan; (2) Deregulasi Kebijakan; (3) Penataan Organisasi; (4) Penataan Tatalaksana; (5) Penataan SDM Aparatur; (6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (7) Penguatan Pengawasan; (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan (9) *Quick Wins*.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi KKP dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain reformasi birokrasi KKP merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya

guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Oleh karena itu KKP harus segera mengambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistemik sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien sesuai dengan visi, misi, dan strategi KKP.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Ditjen PDSPKP sebagai salah satu unit kerja eselon I yang membidangi daya saing produk kelautan dan perikanan memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

Tabel 16. Ikhtisar Pencapaian Nilai PMPRB Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW II 2022-TW II 2023 (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Nilai PMPRB Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	33,5	-	34	-	-	-	-	-	

Pada tahun 2023, nilai PMPRB lingkup Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 33,5. Indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga capaiannya belum bisa diketahui pada triwulan II tahun 2023. Penilaian indikator kinerja ini akan dilakukan Kementerian PAN dan RB atau Inspektorat Jenderal KKP jika tidak ada penilaian dari Kementerian PAN dan RB.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Rapat Penyempurnaan Data Dukung Evaluasi Jabatan Fungsional Pembina Mutu HKP dan Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu HKP, tanggal 17 Mei 2023;
- b. Rapat Bimbingan Teknis Penyusunan SOP Lingkup Ditjen PDSPKP, tanggal 6-7 Juni 2023;
- c. Rapat Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Ditjen PDSPKP, tanggal 9 Juni 2023;

- d. Rapat Pembahasan Usulan Proses Bisnis, Tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon II Lingkup Ditjen PDSPKP, tanggal 15 Juni 2023;
- e. Rapat Persiapan Tindak Lanjut Penataan Jabatan Pelaksana Lingkup Ditjen PDSPKP, tanggal 16 Juni 2023;

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp973.314.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp393.997.504,- (40,48%) pada triwulan II Tahun 2023.



Gambar 30. Bimbingan Teknis Penyusunan SOP Lingkup Ditjen PDSPKP, 6 – 7 Juni 2023



Gambar 31. Pembahasan Usulan Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon II Lingkup Ditjen PDSPKP tanggal 15 Juni 2023

11. Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP

WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat hasil penilaian indikator pengungkit dan indikator hasil lebih besar atau sama dengan 75 sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Piagam Penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

WBK merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Penilaian Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK berpedoman pada Lembar Kerja Evaluasi yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

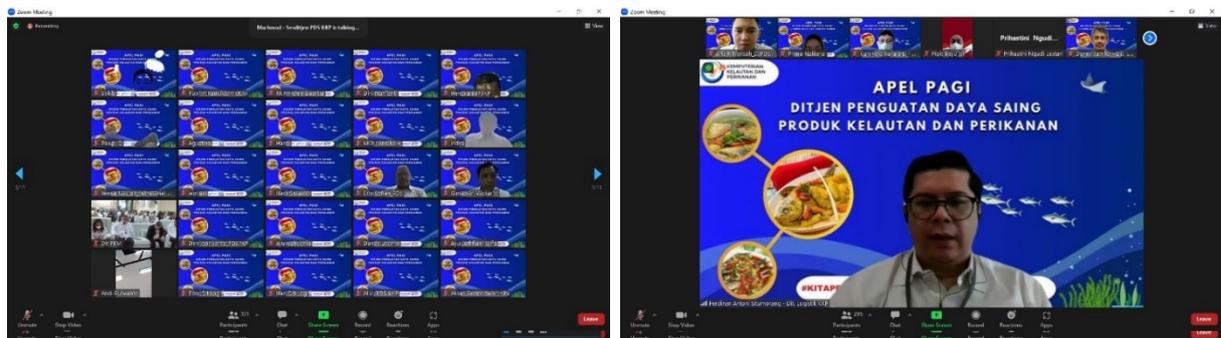
Tabel 17. Ikhtisar Pencapaian Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW II 2022-TW II 2023 (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Unit Kerja Berpredikat menuju WBK Lingkup Ditjen PDSPKP (Unit Kerja)	4	-	2	-	-	-	-	-	

Pada tahun 2023, Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK lingkup Ditjen PDSPKP ditargetkan sebanyak 4 unit kerja. Indikator kinerja ini bersifat tahunan. Pengukuran indikator kinerja ini akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP dan hasil penilaiannya akan didapatkan pada akhir tahun 2023.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Melakukan *Morning Briefing* RB lingkup Ditjen PDSPKP pada hari Senin minggu pertama dan lingkup BBP3KP dilaksanakan hari Senin minggu kedua;
- b. Telah dilakukan pemantauan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di BBP3KP oleh Inspektorat IV, dengan nilai 84,32 yang terdiri dari nilai Komponen Pengungkit sebesar 47,78 (Nilai Pemenuhan 24,27 dan Nilai Reform 23,51) dan nilai Komponen Hasil sebesar 36,54;
- c. Penilaian pendahuluan pembangunan zona integritas di Direktorat Pemasaran telah dilaksanakan pada tanggal 20-21 Maret 2023 dengan hasil penilaian yaitu 85,77 dengan total pengungkit 49,69 dan total hasil 36,08 serta masing-masing area telah memenuhi syarat minimal 60%;
- d. Melakukan koordinasi, melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan untuk penilaian WBK lingkup Direktorat Usaha dan Investasi, serta menindaklanjuti hasil reuiu Itjen KKP pada periode tahun sebelumnya.



Gambar 32. Morning Briefing Reformasi Birokrasi tanggal 3 April 2023

12. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tabel 18. Ikhtisar Pencapaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW II 2022-TW II 2023 (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP (Nilai)	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2023, Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 3,1. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya belum dihitung pada triwulan II tahun 2023.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP antara lain:

- a. Menghadiri *Workshop* Tata Cara Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2023 pada tanggal 22 Mei 2023 yang diselenggarakan Inspektorat Jenderal dengan Narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

- b. Mengadakan pembahasan terkait pengisian kertas kerja maturitas SPIP terintegrasi beserta dokumen pendukungnya yang dilaksanakan pada tanggal 9, 12, 13 dan 16 Juni 2023.

13. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018).

Tabel 19. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW II 2022-TW II 2023 (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP (Indeks)	83,2	75	76	78,71	94,60	104,95	103,57	76,90	2,35

Indeks profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP pada triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar 78,71 atau berkategori sedang. Capaian ini setara dengan 104,95% terhadap target triwulan II tahun 2023 yakni 75 atau setara dengan 94,60% terhadap target tahun 2023 yakni 83,2. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 yakni 76, maka capaian triwulan II tersebut setara dengan 103,57%. Jika dibandingkan capaian triwulan II tahun 2022 yakni 76,90 maka capaian triwulan II tahun 2023 meningkat sebesar 2,35%.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen PDSPKP antara lain:

- a. Rapat Penyusunan Naskah Soal Seleksi Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional, tanggal 6 April 2023;

- b. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Disiplin dan Kinerja Pegawai Triwulan I, tanggal 10 Mei 2023;
- c. Rapat Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer, tanggal 5 Mei 2023;
- d. Pelantikan Jabatan Fungsional dan Sumpah Pegawai, tanggal 9 Mei 2023;
- e. Rapat Pembukaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional APHP, Pembina Mutu & Asisten Pembina Mutu, tanggal 29 Mei 2023;
- f. Rapat uji coba soal Jabatan Fungsional APHP dan Pembina Mutu tanggal 8 Juni 2023;
- g. Rapat Pleno Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional APHP, tanggal 12-16 Juni 2023;
- h. Rapat Pleno Penilaian Angka Kredit JF Pembina Mutu Hasil KP dan JF Asisten Pembina Mutu Hasil KP, tanggal 20-23 Juni 2023;
- i. Rapat Pembahasan Tenaga Kontrak menjadi *Outsourcing* tanggal 12 Juni 2023.



Gambar 33. Penghitungan Formasi Statistisi dan Pranata Komputer, tanggal 5 Mei 2023



Gambar 34. Rapat Pleno Penilaian Angka Kredit JF Pembina Mutu Hasil KP dan JF Asisten Pembina Mutu Hasil KP, tanggal 20-23 Juni 2023

14. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP

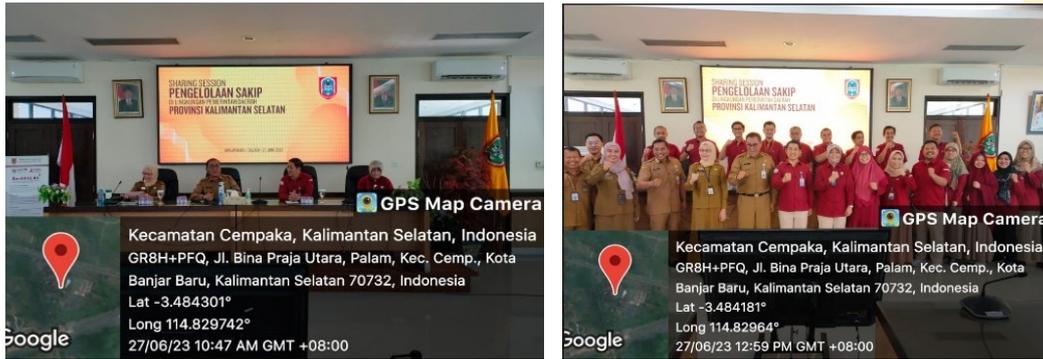
SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai PMSAKIP merupakan penilaian mandiri oleh Itjen KKP terhadap penerapan SAKIP pada instansi pemerintah yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada penerapan *outcome* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Tabel 20. Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW II 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	80,5	-	84,75	-	-	-	-	-	

Pada tahun 2023, nilai PMSAKIP Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 80,5. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga belum dinilai di triwulan II tahun 2023. Penilaian atas PMSAKIP Ditjen PDSPKP akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP atau mandiri jika tidak ada penilaian dari Inspektorat Jenderal KKP.

- Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:
- a. Mengesahkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 74 Tahun 2023 tentang Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dengan tanggal pengesahan 11 April 2023;
 - b. Menetapkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Indikator Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2023 tanggal 7 Juni 2023;
 - c. Melakukan reviu perjanjian kinerja, manual indikator kinerja, rincian target indikator kinerja, rencana aksi atas perjanjian kinerja, pohon kinerja, dan matriks cascading lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2023 pada tanggal 6 April 2023;
 - d. Kegiatan pengukuran kinerja, verifikasi data capaian kinerja, penyusunan laporan kinerja, dan penyusunan evaluasi rencana aksi dilakukan secara berkala triwulanan. Kegiatan-kegiatan dimaksud telah dilakukan dengan melibatkan pejabat eselon II (Sesditjen PDSPKP) karena akan mempengaruhi penilaian pada aspek pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMSAKIP dalam hal keterlibatan pimpinan;
 - e. Penyampaian laporan kinerja yang sudah disahkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Eselon I lingkup KKP, serta stakeholders terkait secara tepat waktu yakni paling lambat 1 bulan setelah periode pelaporan triwulanan berakhir yang dibuktikan dengan surat resmi. Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu akan meningkatkan penilaian pada aspek pelaporan pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMSAKIP;
 - f. *Sharing Session* Pengelolaan SAKIP di Bappeda Kalimantan Selatan pada tanggal 26-28 Juni 2023.



Gambar 35. Sharing Session Pengelolaan SAKIP di Bappeda Kalimantan Selatan

15. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP merupakan jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai tuntutan ganti rugi Unit Eselon I atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Ditjen PDSPKP Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PDSPKP tahun 2022.

Tabel 21. Ikhtisar Pencapaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW II 2022-TW II 2023 (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	≤0,5	-	≤1	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2023, batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) lingkup Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar ≤0,5%. Sampai dengan triwulan II tahun 2023 belum ada surat resmi terkait nilai temuan LHP BPK atas LK Ditjen PDSPKP Tahun 2022 sehingga capaiannya belum bisa dihitung.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain :

- a. Menghadiri undangan Inspektorat Jenderal KKP pada tanggal 5-8 Juni 2023. Kegiatan ini merupakan pra pemutakhiran data tindak lanjut periode semester I 2023. Pembahasan melibatkan Inspektorat Jenderal selaku penanggungjawab tindak lanjut, Inspektorat mitra unit kerja eselon I, Biro Keuangan dan seluruh perwakilan dari unit eselon I lingkup KKP. Dokumen tindak lanjut dari Ditjen PDSPKP adalah sebagai berikut:
 - SK penghapusan DKP Provinsi Riau, DKP Provinsi Kalimantan Selatan, DKP Provinsi Sulawesi Selatan, DKP Provinsi Bali, DKP Provinsi Jawa Tengah, dan DKP Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Bukti setor DKP Kabupaten Konawe sebagai tindak lanjut LHP BPK atas LK 2016;
 - Surat ke KPKNL Manado sebagai tindak lanjut atas LHP di DKP Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - Surat Edaran Plh. Sekjen KKP Nomor B.274/MEN-SJ/PL.730/V/2023 tentang Kebijakan Pengendalian Bahan Bakar Minyak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- d. Atas dokumen tindak lanjut tersebut, telah dilakukan proses penginputan ke dalam aplikasi SIPTL BPK-RI.

16. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik berdasarkan surat maupun bab) yang terbit pada triwulan IV Tahun 2022 s.d Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan.

Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan oleh Itjen KKP atau dapat dilihat pada Aplikasi SIDAK dengan periode perhitungan triwulanan.

Tabel 22. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP

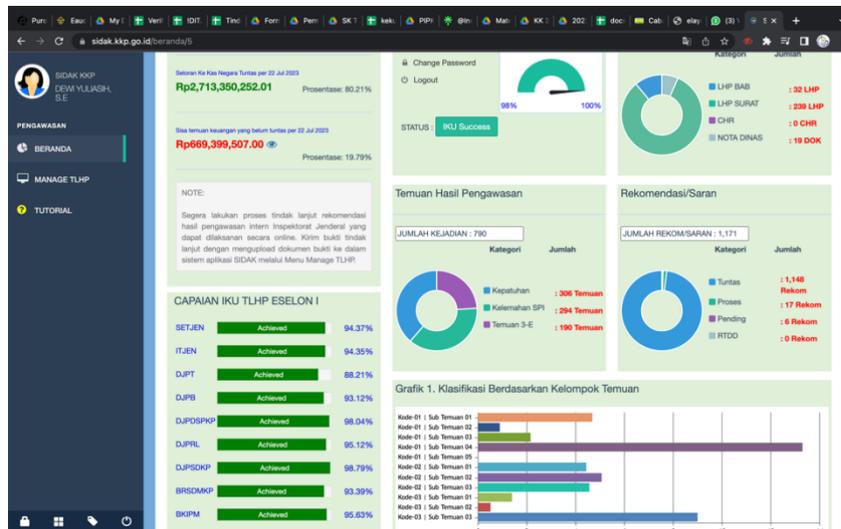
Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW II 2022-TW II 2023 (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP (%)	75	75	80	92,86	123,81	123,81	116,08	96,77	-4,02

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP pada triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 92,86%. Capaian ini setara dengan 123,81% terhadap target Triwulan II dan Target tahun 2023 yaitu 75%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 96,77%, maka capaian triwulan II tahun 2023 turun sebesar 4,02%. Jika dibandingkan target jangka menengah tahun 2024 sebesar 80%, maka capaian ini setara dengan 116,08%.

Pada triwulan II 2023, Ditjen PDSPKP telah mengadakan pembahasan guna pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan pada tanggal 5-7 Juli 2023. Sampai dengan 30 Juni 2023, terdapat rekomendasi yang belum tuntas periode dibawah tahun 2022 sebanyak 11 dengan rincian 10 berstatus proses dan 1 *pending*. Untuk rekomendasi berstatus *pending* yang masih belum bisa diselesaikan terdapat pada hasil evaluasi pasar Ikan *Higienis* Pejompong dimana direkomendasikan terkait persetujuan kepada Menteri Keuangan atas pemanfaatan BMN yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Terhadap keseluruhan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal sampai dengan triwulan II 2023, persentase tindak lanjut adalah sebesar 98,04%. Hal ini dikarenakan masih terdapat 1 hasil pemeriksaan

Inspektorat Jenderal yaitu Hasil Evaluasi Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Tahun 2022 dan 2023 yang masih belum ditindaklanjuti sampai dengan hari terakhir pembahasan.



Gambar 36. Hasil Tangkap Layar pada Aplikasi SIDAK

17. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan, replikasi maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Inovasi pelayanan publik yang sudah diterapkan oleh unit kerja dapat diikuti dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) adalah kegiatan penjangkaran, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada Inovasi yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Untuk mengikuti KIPP, setiap unit kerja mengirimkan proposal inovasi yang memuat informasi, gagasan atau ide mengenai inovasi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK). Proposal inovasi tersebut dikirimkan kepada Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan cara mengunggah proposal pada SINOVIK.

Tabel 23. Ikhtisar Pencapaian Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW II 2022-TW II 2023 (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	75	-	-	-	-	-	-	-	-

Capaian indikator kinerja dihitung berdasarkan hasil penilaian proposal inovasi pelayanan publik yang disusun oleh Ditjen PDSPKP, diseleksi dan diajukan ke Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik oleh koordinator Reformasi. Pada tahun 2023, nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik lingkup Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 75. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya belum dihitung pada triwulan II tahun 2023. Selain itu indikator kinerja ini baru di tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Kriteria Inovasi Pelayanan Publik mencakup: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi dan berkelanjutan.

sedangkan kelompok inovasi mencakup: kelompok umum dan kelompok khusus. perhitungan perhitungan capaian untuk aspek penilaian kelompok umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), signifikansi (25%), kontribusi terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (5%), adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%) dan kolaborasi pemangku kepentingan (5%). aspek penilaian kelompok khusus mencakup pembaruan/peningkatan inovasi (25%), adaptabilitas (20%), penguatan keberlanjutan (25%) dan evaluasi (30%).

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa upaya dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, tanggal 6 April 2023;
- b. Pembahasan Standar Pelayanan Publik, tanggal 12 April 2023;
- c. Finalisasi Proposal Inovasi Pelayanan Publik, tanggal 13 April 2023;
- d. Penilaian Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), tanggal 14 April 2023;
- e. Reviu Proposal KIPP Berdasarkan Hasil Pleno Tim KKP, tanggal 28 April 2023;
- f. Proposal KIPP Berdasarkan Hasil Pleno Tim KKP, tanggal 9 Mei 2023;
- g. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik, tanggal 10 Mei 2023;
- h. Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Lingkup Ditjen PDSPKP, tanggal 23 Mei 2023;
- i. Penilaian Mandiri Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Penilaian Mandiri (PEKPPP), tanggal 5-6 Juni 2023.



Gambar 37. Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

18. Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penghitungan persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang standar, diperoleh dari persentase unit kerja level 1 dan 2 yang tergabung dan mendistribusikan informasinya dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terpilih dibandingkan dengan seluruh unit kerja di Ditjen PDSPKP.

Tabel 24. Ikhtisar Pencapaian Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW II 2022-TW II 2023 (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92	92	86	100	108,70	108,70	116,28	100	-

Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 100%. Capaian ini setara dengan 108,7% terhadap target tahun

2023 yakni 92% atau 108,7% terhadap target triwulan II tahun 2023 yakni 92%. Jika dibandingkan target jangka menengah tahun 2024 yakni 86, maka capaian triwulan II tahun 2023 setara dengan 116,28%.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa upaya dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Pengumpulan data *user (email)* untuk pembuatan *user* aplikasi manajemen pengetahuan (bitrix24) bagi yang belum memiliki sekaligus melakukan pembaharuan nama pegawai dalam struktur organisasi;
- b. Optimalisasi penggunaan aplikasi manajemen pengetahuan (bitrix24) melalui: a) Penyimpanan dokumen secara *online*, b) *Polling* dan penyampaian penghargaan, c) Sirkulasi Undangan/ Pengumuman secara *online*, d) Data umum pegawai berdasarkan struktur organisasi, e) Jadwal dan hasil kegiatan, f) Disposisi, dan g) Percakapan dan komunikasi;
- c. Setiap menjelang akhir triwulan, dilakukan *warning system* kepada pejabat eselon 2, koordinator kelompok dan sub koordinator terhadap keaktifannya dalam menggunakan aplikasi bitrix24 sebagai alat penilaian IKU.

19. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator kinerja ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Tabel 25. Ikhtisar Pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW II 2022-TW II 2023 (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	89	82	90	81,88	99,85	92	90,98	85,73	-4,49

Pada tahun 2023, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 89 (Baik). Nilai IKPA lingkup Ditjen PDSPKP pada triwulan II tahun 2023 tercapai sebesar 81,88. Capaian ini setara dengan 99,85 terhadap target triwulan II tahun 2023, dan sebesar 92% terhadap target tahun 2023. Sedangkan jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 sebesar 90,98, capaian triwulan II tahun 2023 sebesar 81,88 setara dengan 90,98%. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2022 sebesar 85,73, maka capaian triwulan II tahun 2023 menurun sebesar 4,49%.

Faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target nilai IKPA triwulan II tahun 2023 antara lain:

- a. Pengadaan barang/jasa masih dalam proses pelaksanaan sehingga realisasi anggaran dan realisasi output belum capaiannya belum optimal;
- b. Adanya deviasi halaman III DIPA yang disebabkan kurang sesuainya realisasi pelaksanaan anggaran dengan rencana penarikan dananya.

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian nilai IKPA, antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran baik fisik maupun non fisik;

- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rencana penarikan dana pada lembar III DIPA dengan realisasi pelaksanaan anggaran.

20. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai ini diperoleh dari data *input* dan *output* yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu.

Aplikasi SMART DJA Kemenkeu telah dibangun dan efektif digunakan sejak tahun anggaran 2012 untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi SMART DJA Kemenkeu yang mengacu pada PMK tersebut adalah melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas Aspek Implementasi. Namun, seiring dengan penyempurnaan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, aplikasi SMART DJA Kemenkeu juga telah disempurnakan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran yang mengacu pada PMK tersebut dengan melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja yang mencakup Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Penyempurnaan pelaksanaan pengukuran evaluasi kinerja anggaran kembali dilakukan untuk menyesuaikan pelaksanaan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dengan diterbitkannya PMK Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Tabel 26. Ikhtisar Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW II 2022-TW II 2023 (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP (Nilai)	86	-	89	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2023, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 86 (Baik). Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya belum dihitung pada triwulan II tahun 2023. Capaian akan diperoleh melalui Aplikasi SMART DJA Kemenkeu.

21. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PDSPKP merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kinerja pengawasan intern KKP dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 27. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW II 2022-TW II 2023 (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	77,5	-	80	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2023, tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 77,5%. Indikator kinerja ini bersifat tahunan. Pengukuran indikator kinerja ini akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP dan hasil penilaiannya akan didapatkan setelah berakhirnya tahun anggaran 2023.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain :

- a. Melaksanakan kegiatan penginputan data realisasi P3DN dan TKDN sampai dengan periode 31 Maret 2023 pada tanggal 4 - 6 April 2023. Kegiatan dilaksanakan di Yogyakarta dan diikuti oleh operator SAKTI Modul Komitmen, modul persediaan dan para Subkoordinator Tata Usaha. Pada kegiatan tersebut juga dihadirkan narasumber dari Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, serta Kementerian Keuangan;
- b. Melaksanakan kegiatan Monitoring Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP s.d Bulan April 2023 pada tanggal 10 Mei 2023. Kegiatan dilaksanakan di RR. Branding dan diikuti oleh perwakilan seluruh unit eselon 2 dilingkungan Ditjen PDSPKP;
- c. Melaksanakan pertemuan dalam rangka monitoring pelaksanaan pengadaan barang dan jasa per Mei 2023 serta penginputan TKDN per Mei 2023 Lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 8 Juni 2023. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat Investasi dan diikuti oleh perwakilan seluruh unit eselon 2 dilingkungan Ditjen PDSPKP serta UPT BBP3KP;
- d. Melaksanakan *update* SIRUP dan Monitoring Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa oleh Tim Inspektorat IV pada 12 s.d 14 Juni 2023. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Raiser Ikan Hias Cibinong;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Biro Umum dan PBJ terkait realisasi anggaran pengadaan barang dan jasa antara realisasi pada aplikasi SAKTI dengan realisasi pada aplikasi LPSE pada tanggal 30 Juni 2023. Setelah koordinasi dilanjutkan dengan kegiatan penginputan data realisasi P3DN dan TKDN sampai dengan periode 30 Juni 2023. Kegiatan ini diikuti oleh Operator Komitmen, Operator SIRUP perwakilan seluruh unit eselon 2 di lingkungan Ditjen PDSPKP serta UPT BBP3KP.

22. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP

Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Ditjen PDSPKP. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai.

Kegiatan yang dikategorikan prioritas/strategis antara lain memenuhi kriteria berikut :

- a. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat;
- b. Memiliki anggaran besar;
- c. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP;
- d. Mendukung pencapaian prioritas nasional;
- e. Merupakan arahan direktif presiden;
- f. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Tabel 28. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW II 2022-TW II 2023 (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	77,5	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2023, tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis di lingkungan Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 77,5%. Indikator kinerja ini bersifat tahunan. Pengukuran indikator kinerja ini akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP dan hasil penilaiannya akan didapatkan setelah berakhirnya tahun anggaran 2023.

Pada tahun 2023, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang

dilaksanakan pada tahun 2022 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya. Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP terus melaksanakan pemantauan atas pemanfaatan bantuan yang diberikan kepada Dinas Kab/Kota atau masyarakat pada tahun 2022 dan termasuk dalam kegiatan prioritas Ditjen PDSPKP.

23. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP

Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen PDSPKP merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja pengawasan intern Ditjen PDSPKP dalam mengawal dan memastikan pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen PDSPKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen PDSPKP diukur melalui pemenuhan beberapa indikator berikut:

- a. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023;
- b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2023;
- d. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
- e. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Tabel 29. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW II 2022-TW II 2023 (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	77,5	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2023, tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 77,5%. Indikator kinerja ini bersifat tahunan. Pengukuran indikator kinerja ini akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP dan hasil penilaiannya akan didapatkan setelah berakhirnya tahun anggaran 2023.

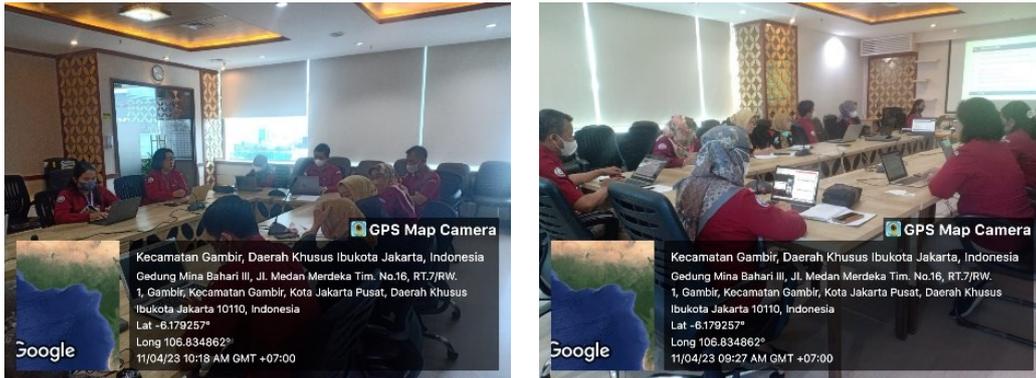
Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain :

- a. Mengadakan kegiatan pengawasan terpadu Pengelolaan PIM Muara Baru pada tanggal 10 - 12 Mei 2023. Kegiatan diikuti oleh Inspektorat IV – Inspektorat Jenderal KKP; Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa – Sekretariat Jenderal KKP; Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan - Ditjen PSDKP; Pusat Pengendalian Mutu – BPKIPM KKP; Sekretariat Direktorat Jenderal PDSPKP; Direktorat Pemasaran; Balai Besar P3KP; Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zahman - DJPT; dan Pangkalan PSDKP Jakarta – Ditjen PSDKP;
- b. Mengadakan kegiatan pengawasan terpadu pengelolaan *Cold Storage* 2000 ton dan 1000 Ton pada tanggal 16 - 17 Mei 2023. Kegiatan diikuti oleh Inspektorat IV – Inspektorat Jenderal KKP; Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa – Sekretariat Jenderal KKP; Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan – Ditjen PSDKP; Pusat Pengendalian Mutu – BPKIPM KKP; Sekretariat Direktorat Jenderal PDSPKP; Direktorat Logistik – Ditjen PDSPKP; perwakilan BBP3KP; dan Pangkalan PSDKP Jakarta – Ditjen PSDKP;

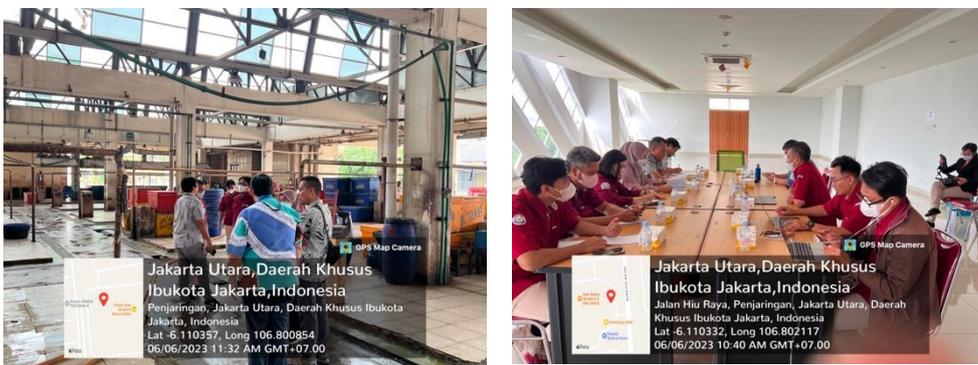
- c. Mengadakan diskusi hasil pengawasan terpadu pengelolaan PIM Muara Baru pada tanggal 23 Mei 2023, *Cold Storage* 2000 Ton dan *Cold Storage* 1000 Ton. Pertemuan dihadiri oleh Inspektorat IV – Inspektorat Jenderal KKP; Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa – Sekretariat Jenderal KKP; Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan – Ditjen PSDKP; Pusat Pengendalian Mutu – BPKIPM KKP; Sekretariat Direktorat Jenderal PDSPKP; Direktorat Pemasaran – Ditjen PDSPKP; Direktorat Pemasaran – Ditjen PDSPKP; Balai Besar P3KP; dan perwakilan Pangkalan PSDKP Jakarta – Ditjen PSDKP;
- d. Mengadakan pertemuan koordinasi terkait serah terima PIH Pejompongan pada tanggal 11 April 2023 berkaitan dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama Nomor 083/DJ-PK2P/HK.213/VIII/2003 dan Nomor 0501/-1.823.508. Pertemuan diikuti oleh DJKN, PD Pembangunan Sarana Jaya, BPAD Provinsi Jakarta, Inspektorat IV, Biro Hukum dan Organisasi, Biro Keuangan, Direktorat Pemasaran, Sekretaris Ditjen PDSPKP;
- e. Melakukan pendampingan penilaian sewa PIM Muara Baru Jakarta pada tanggal 6 Juni 2023. Kegiatan diikuti oleh Tim Penilai KPKNL Jakarta II, Direktorat Pemasaran dan Sekretariat Ditjen PDSPKP;
- f. Melakukan pendampingan penilaian Kapal Jananuraga di Dermaga CT III BPKS Sabang pada tanggal 20 - 22 Juni 2023. Kegiatan diikuti oleh Tim Penilai DJKN - Kementerian Keuangan, Biro Keuangan KKP, Inspektorat Jenderal KKP, Setditjen PDSPKP, dan Direktorat Logistik.



Gambar 38. Pengawasan Terpadu *Cold Storage* Muara Baru



Gambar 39. Pertemuan Koordinasi terkait Serah Terima PIH Pejompongan



Gambar 40. Pendampingan Penilaian Sewa PIM Muara Baru



Gambar 41. Pendampingan penilaian Kapal Jananuraga

24. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP

Ketersediaan data yang valid, mutakhir dan dapat dipercaya menjadi kebutuhan setiap organisasi. Kondisi lingkungan yang sangat dinamis menuntut Ditjen PDSPKP untuk mampu menyediakan data secara tepat, akurat dan terkini. Ketersediaan data tersebut akan banyak membantu dalam proses perencanaan, formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan. Data PDSPKP yang akurat akan menghasilkan

proses perencanaan yang benar dan pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan para pengolah maupun pemasar hasil perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal PDSPKP diberikan amanat untuk menjadi Unit Data Eselon I yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola data lingkup Ditjen PDSPKP. Beberapa kegiatan pengelolaan data lingkup Ditjen PDSPKP antara lain pengumpulan data pelaku usaha dan produksi, verifikasi dan validasi data serta analisis data bidang PDSPKP.

Rencana Strategis Ditjen PDSPKP 2020 - 2024, Direktorat Jenderal PDSPKP menargetkan tingkat kepatuhan pengelolaan data lingkup pada tahun 2023 sebesar 90%. Capaian indikator kinerja ini belum bisa diketahui pada triwulan II (Semester I) tahun 2023, karena indikator kinerja bersifat tahunan. Berikut tabel ikhtisar pencapaian kepatuhan pengelolaan data lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP.

Tabel 30. Ikhtisar Pencapaian Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW II 2022-TW II 2023 (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	90	-	-	-	-	-	-	-	-

Dalam rangka pencapaian kepatuhan pengelolaan data lingkup Ditjen PDSPKP, beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal PDSPKP selama triwulan II 2023 antara lain:

1. Rapat Pedoman Pendataan Bidang PDSPKP pada tanggal 3 April 2023 di Bogor;
2. Rapat verifikasi dan validasi Satu Data KP Bidang PDSPKP Tahun 2022 pada tanggal 17 – 18 April 2023;
3. Menghadiri kegiatan sosialisasi aplikasi satu data KP pada tanggal 3 Mei 2023 yang diselenggarakan oleh Pusdatin, Setjen-KKP;

4. Rapat tata kelola data bidang bidang PDSPKP pada tanggal 5 Mei 2023;
5. Undangan Workshop Standar Data dan Metadata pada tanggal 24-26 Mei 2023 di Bogor;
6. Kegiatan pendataan stok ikan dan pendampingan implementasi STELINA di kota Surabaya pada tanggal 28 – 30 Mei 2023;
7. *Training of Trainer* (TOT) Simulasi Input Data dalam Aplikasi *Web Satu Data* KP bagi Enumerator dan Validator di Bandung pada tanggal 14 – 16 Juni 2023;
8. Koordinasi pengelolaan data ekspor – impor hasil perikanan di Kantor Pusat Badan Pusat Statistik pada tanggal 21 Juni 2023;
9. Rapat Integrasi Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP pada tanggal 23 Juni 2023.



Gambar 42. Training of Trainer (TOT) Simulasi Input Data dalam Aplikasi Web Satu Data KKP Bagi Enumerator dan Validator di Bandung 14 – 16 Juni 2023

C. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2023, anggaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang dikelola oleh Ditjen PDSPKP (pagu anggaran awal) adalah sebesar Rp388.500.000.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah) yang seluruhnya merupakan APBN

rupiah murni. Setelah adanya *Auto Adjustment* (AA) sebesar Rp80.943.119.000,- (delapan puluh miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu rupiah), pagu anggaran Ditjen PDSPKP menjadi Rp307.556.881.000,- (tiga ratus tujuh miliar lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Tabel 31. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Kewenangan Triwulan II Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1	Pusat	326.906.679.000	82.522.124.177	25,24
2	UPT	35.970.109.000	13.282.708.720	36,93
3	Dekonsentrasi	25.623.212.000	-	-
4	Tugas Pembantuan	-	-	-
Total		388.500.000.000	95.804.832.897	24,66

Sumber: Aplikasi Omspan Kemenkeu Realisasi Sampai dengan Juni 2023

Tabel 32. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Jenis Kegiatan Triwulan II Tahun 2023

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1	Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	77.844.186.000	5.787.682.227	7,43
2	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	79.380.069.000	28.162.058.093	35,48
3	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	60.870.745.000	5.628.952.394	9,25
4	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	24.000.000.000	4.861.138.700	20,25
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PDSPKP	138.080.000.000	48.443.468.383	35,08
6	Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	8.325.000.000	2.921.533.100	20,83
Total		388.500.000.000	95.804.832.897	24,66

Sumber: Aplikasi Omspan Kemenkeu Realisasi sampai dengan Juni 2023

Pada triwulan II tahun 2023, penyerapan anggaran Ditjen PDSPKP adalah sebesar Rp95.804.832.897,- (sembilan puluh lima miliar delapan ratus empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Realisasi ini setara dengan 24,66% terhadap total pagu anggaran awal atau 31,15% pagu anggaran pasca AA.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran triwulan II tahun 2023 yaitu proses pengadaan barang dan jasa gagal lelang sehingga menyebabkan mundurnya waktu pelaksanaan kontrak. Upaya

yang telah dilakukan dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran, antara lain:

- 1) Meningkatkan ketertiban penyampaian data kontrak;
- 2) Mereviu RKAKL sesuai rencana kegiatan dan segera melakukan revisi DIPA apabila ada perubahan kebijakan program/kegiatan;
- 3) Memastikan seluruh administrasi pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran belanja telah sesuai dengan ketentuan; dan
- 4) Melibatkan Kelompok Program, Kelompok Keuangan dan Umum, serta Itjen KKP dalam pemantauan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2023 menyajikan capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja. Capaian dimaksud selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian periode sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja Ditjen PDSPKP berbagai upaya telah dilakukan seperti koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana aksi dalam rangka mencapai indikator kinerja.

Terdapat perubahan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga tidak selaras dengan Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024, sehingga pembahasan capaian dalam Laporan Kinerja menggunakan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Indikator kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No	IKU	Satuan	Target	
			Renstra	PK
1	Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program	Rp Triliun	3,60	9,6
2	Nilai PNBK Ditjen PDSPKP*	Rp Miliar	-	8,65
3	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP*	Orang	-	49.600
4	Persentase unit kerja yang Menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen PDSPKP	%	84	92
5	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP	Indeks	76	83,2
6	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PDSPKP*	%	-	77,5

No	IKU	Satuan	Target	
			Renstra	PK
7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP*	%	-	77,5

*Indikator kinerja belum tercantum dalam Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024

Secara umum, indikator kinerja Ditjen PDSPKP yang dapat dihitung pada triwulan II tahun 2023 telah tercapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NKO) yang terukur pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) mencapai 95,93.

B. Permasalahan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja Ditjen PDSPKP triwulan II tahun 2023, terdapat 2 indikator kinerja yang tidak mencapai target yakni Nilai Ekspor Hasil Perikanan dan Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program. Adapun permasalahan dan rencana tindak lanjut ke depan antara lain:

Indikator Kinerja	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
Nilai Ekspor Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan permintaan impor produk perikanan di pasar Amerika Serikat sebagai salah satu negara tujuan ekspor produk perikanan utama Indonesia. Berdasarkan <i>IMF World Economic Outlook April 2023</i>, Amerika Serikat diperkirakan ekonominya melambat dari 2,1% (2022) menjadi 1,6% (2023). • Perlambatan ekonomi yang terjadi di negara-negara utama tujuan ekspor produk perikanan seperti di Amerika Serikat telah mempengaruhi daya beli masyarakat. Sebagai contoh, total nilai impor produk perikanan di Amerika Serikat hingga April 2023 mengalami penurunan sebesar 19,67% dari USD 11,08 Miliar pada tahun 2022 menjadi USD 8,90 Miliar pada tahun 2023 • Diversifikasi pasar produk ekspor belum optimal dikarenakan adanya hambatan ekspor di 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan potensi hambatan ekspor di Amerika Serikat melalui pemenuhan Persyaratan Sertifikasi Udang Tangkapan Amerika Serikat melalui penyampaian tanggapan <i>additional information</i> kepada pihak US. <i>Department of State</i> dan penyampaian dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam proses sertifikasi tersebut. • Mempercepat penyelesaian peningkatan akses pasar di Jepang, melalui percepatan penyelesaian perundingan IJEPA untuk produk perikanan. • Melakukan sinergitas dan kerjasama dengan BPOM dalam rangka pelaksanaan eksportasi ikan dan olahan ikan ke Kerajaan Arab Saudi. • Melakukan persiapan dan perumusan posisi dan strategi perundingan <i>Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF)</i> dalam rangka peningkatan akses pasar produk perikanan; • Fasilitasi keikutsertaan dalam pameran <i>seafood</i> skala internasional khususnya <i>World Seafood Shanghai Exhibition</i>; • Penyelenggaraan <i>Foreign Buyer Mission</i> produk <i>seafood</i> di Indonesia.

Indikator Kinerja	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
	beberapa negara tujuan baik tarif maupun non tarif (SPS dan TBT). Beberapa kendala ekspor non-tarif antara lain adanya hambatan registrasi dan penambahan eksportir terdaftar di negara tujuan ekspor antara lain Uni Eropa, Rusia, RRT, Arab Saudi, Chili dan Brazil.	
Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan kebijakan KUR tahun 2023 yang ditetapkan dalam Permenko Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 mengakibatkan adanya perubahan sistem, sehingga perbankan memerlukan waktu untuk melakukan penataan penyaluran pembiayaannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan, pendampingan dan monitoring Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan (TPU KP) sebanyak 81 personil yang tersebar di 74 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi. Edukasi dan sosialisasi literasi keuangan melalui pelaksanaan bimbingan teknis kewirausahaan dan akses pembiayaan
Indikator Pelaksanaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan barang/jasa masih dalam proses pelaksanaan sehingga realisasi anggaran dan realisasi output belum capaiannya belum optimal; Adanya deviasi halaman III DIPA yang disebabkan kurang sesuai realisasi pelaksanaan anggaran dengan rencana penarikan dananya 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran baik fisik maupun non fisik Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rencana penarikan dana pada lembar III DIPA dengan realisasi pelaksanaan anggaran

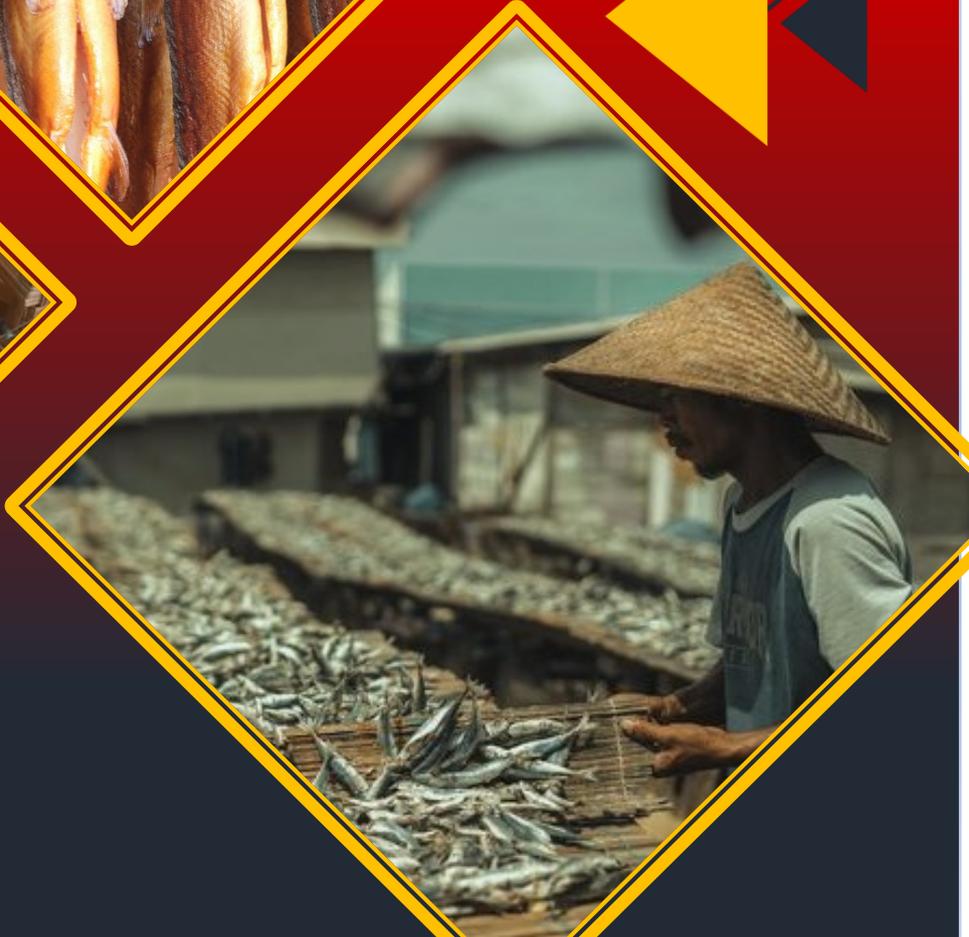
C. Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

Tindak lanjut yang telah dilakukan pada triwulan II tahun 2023 atas rekomendasi pada Laporan Kinerja triwulan I tahun 2023 antara lain :

No	Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan I Tahun 2023	Tindak Lanjut pada Triwulan II Tahun 2023
1	<ul style="list-style-type: none"> Menyelesaikan potensi hambatan ekspor di Amerika Serikat melalui 	a) Keikutsertaan dalam <i>Seafood Expo Global (SEG) 2023</i> yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 April 2023 di Fira Barcelona, Barcelona, Spanyol, dan merupakan pameran

No	Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan I Tahun 2023	Tindak Lanjut pada Triwulan II Tahun 2023
	<p>memenuhi Persyaratan Sertifikasi Udang Tangkapan Amerika Serikat;</p> <ul style="list-style-type: none"> Mempercepat penyelesaian peningkatan akses pasar di Jepang, melalui percepatan penyelesaian perundingan IJEPA untuk produk perikanan; Membantu fasilitasi UKM melalui Business Matching Indonesia dengan Singapura; Percepatan pemenuhan nomor registrasi Saudi Food and Drugs Authority (SFDA) UPI dalam rangka ekspor ke Arab Saudi dalam rangka pasokan untuk catering Haji 2023 untuk produk Patin, Lele, Bandeng, dan Tuna olahan; Melakukan persiapan dan perumusan posisi dan strategi perundingan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) dalam rangka peningkatan akses pasar produk perikanan; Pengembangan dan sosialisasi Bursa Ikan dalam rangka peningkatan akses pasar produk perikanan berbasis elektronik melalui media digital serta mendukung program Kampung Nelayan Maju dan Kampung Budidaya. Fasilitasi keikutsertaan dalam pameran <i>seafood</i> skala internasional. Penyelenggaraan Foreign Buyer Mission produk <i>seafood</i> di Indonesia. 	<p><i>seafood</i> terbesar di dunia dengan peserta berasal lebih dari 77 negara dan dihadiri lebih dari 29.000 pengunjung termasuk importir, <i>processor</i>, <i>wholesaler</i>, distributor, <i>catering</i>, dan <i>food service</i>. Selama pameran berlangsung, nilai transaksi potensial yang dihasilkan sebesar USD 54.64 juta dengan produk yang diminati oleh buyers antara lain: tuna, gurita, cumi-cumi, sotong, udang, kakap merah, kakap putih, marlin, kerapu, tilapia, mahi-mahi, ikan sarden kaleng, ikan tuna kaleng, kingfish, parrot fish, swordfish, wahoo, ribbon fish. dan ikan lainnya. Para calon buyers potensial antara lain berasal dari: Taiwan, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, Spanyol, Australia, China, Peru, Panama, Kanada, Jerman, Ekuador, Hongkong, Meksiko, India, Korea Selatan, Belanda, Kolombia, Turki, Jepang, Perancis, Malta, Puerto Rico, Jepang, Belgia, Polandia, Vietnam, Bermuda dan Persatuan Emirat Arab.</p> <ul style="list-style-type: none"> b) Melakukan konsultasi dengan US. Department of State, US. NOAA dan US Embassy Jakarta dalam rangka pemenuhan persyaratan udang tangkapan laut pada tanggal 14 April 2023; c) Melakukan serangkaian pertemuan Lintas Eselon I dan fungsional penerjemah dalam rangka penyelesaian informasi tambahan dan translasi beberapa regulasi dalam rangka proses sertifikasi ekspor udang tangkapan ke Amerika Serikat selama April-Juni 2023; d) Melakukan sosialisasi Bursa Ikan dalam rangka peningkatan akses pasar produk perikanan berbasis elektronik melalui media digital di Provinsi Lampung tanggal 10 Mei 2023; e) Melakukan beberapa kali pertemuan koordinasi dalam rangka Pertemuan JCM IJEPA dan persiapan pertemuan dengan Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries of Japan pada Juni 2023. f) Melakukan fasilitasi pertemuan antara calon eksportir dengan BKIPM dan BPOM dalam rangka fasilitasi penerbitan HC khusus untuk pasokan haji yang dilaksanakan pada tanggal 29 dan 30 Mei 2023. g) Melakukan pertemuan fasilitatif dalam upaya penanganan permasalahan kasus ekspor di Dubai dan Taiwan pada bulan April dan Mei 2023. h) Melakukan pertemuan persiapan implementasi kerjasama dengan USAID Ber-Ikan dalam rangka mendukung pemenuhan persyaratan ekspor U.S. Marine Mammal Protection Act (MMPA) pada bulan Mei 2023. i) Melakukan kegiatan <i>open call</i> untuk menjaring perusahaan eksportir udang mengikuti kegiatan <i>Foreign Buyer Mission</i> dan kurasi peserta dalam rangka meningkatkan akses pasar udang Indonesia di Uni Eropa pada tanggal 19 Juni 2023.
2	<ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi intensif dengan Lembaga Keuangan penyalur KUR melalui Kelompok Kerja Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan, 	<ul style="list-style-type: none"> d. Pembinaan dan monitoring kepada tenaga pendamping usaha kelautan dan perikanan secara berkala yang dihadiri oleh seluruh TPUKP. Sampai dengan triwulan II 2023, TPUKP telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp17,18 milyar kepada 428 pelaku usaha dan telah memfasilitasi

No	Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan I Tahun 2023	Tindak Lanjut pada Triwulan II Tahun 2023
	<p>untuk sinergi kegiatan dan percepatan penyaluran KUR di sektor KP.</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha KP tentang kebijakan KUR terbaru dan pendampingan intensif TPUKP kepada pelaku usaha binaannya, untuk mendapatkan akses pembiayaan, baik melalui Lembaga keuangan bank ataupun nonbank, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelaku usaha. 	<p>penerbitan NIB bagi 382 pelaku usaha. Selain itu dilakukan edukasi kredit ultra mikro dari PT. PNM dan PT. Pegadaian.</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Koordinasi dan sinergi kegiatan dengan Bank BRI dalam rangka peningkatan akses pembiayaan untuk mendukung program prioritas KKP, serta optimalisasi pemanfaatan data binaan TPUKP untuk dapat difasilitasi KUR BRI maupun program pembiayaan lainnya. f. Identifikasi dan verifikasi calon debitur potensial dalam rangka persiapan kegiatan fasilitasi akses permodalan di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Kebumen g. Pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan secara berkala melalui program GISELA.





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Budi Sulistiyo**

Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Mei 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Budi Sulistiyo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	1.	Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing (Juta Ton)	7,35
2	Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan	2.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	6,77
3	Meningkatnya Konsumsi Ikan Nasional	3.	Konsumsi Ikan (setara utuh segar) (kg/kapita)	57,61
4	Terwujudnya pengelolaan kelautan dan perikanan yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan	4.	Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	6,10
		5.	Kinerja Logistik Hasil Perikanan (Indeks)	58
		6.	Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp. Triliun)	9,6
		7.	Nilai PNBPD Ditjen PDSPKP (Rp. Miliar)	8,65
		8.	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (Orang)	49.600
5	Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan meningkat	9.	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (Indeks)	104,25
6	Tatakelola Pemerintahan yang Baik Mendukung Penguatan Daya Saing KP	10.	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Nilai)	33,5
		11.	Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP (Unit)	4
		12.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP (Nilai)	3,1
		13.	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP (Indeks)	83,2
		14.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	80,5
		15.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen	≤0,5

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	1.	Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing (Juta Ton)	7,35
2	Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan	2.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	6,77
3	Meningkatnya Konsumsi Ikan Nasional	3.	Konsumsi Ikan (setara utuh segar) (kg/kapita)	57,61
4	Terwujudnya pengelolaan kelautan dan perikanan yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan	4.	Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	6,10
		5.	Kinerja Logistik Hasil Perikanan (Indeks)	58
		6.	Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp. Triliun)	9,6
		7.	Nilai PNBPD Ditjen PDSPKP (Rp. Miliar)	8,65
		8.	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (Orang)	49.600
5	Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan meningkat	9.	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (Indeks)	104,25
6	Tatakelola Pemerintahan yang Baik Mendukung Penguatan Daya Saing KP	10.	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Nilai)	33,5
		11.	Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP (Unit)	4
		12.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP (Nilai)	3,1
		13.	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP (Indeks)	83,2
		14.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	80,5
		15.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen	≤0,5

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		PDSPKP	
		16. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP (%)	75
		17. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	75
		18. Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92
		19. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	89
		20. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	86
		21. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen PDSPKP (%)	77,5
		22. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	77,5
		23. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP(%)	77,5
		24. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	90

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		PDSPKP	
		16. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP (%)	75
		17. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	75
		18. Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92
		19. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	89
		20. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	86
		21. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen PDSPKP (%)	77,5
		22. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	77,5
		23. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP(%)	77,5
		24. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	90

Data Anggaran

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP.000)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	148.575.814
-	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	79.380.069
-	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	60.870.745
-	Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	8.325.000
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	101.844.186
-	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	24.000.000
-	Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	77.844.186
3	Program Dukungan Manajemen	138.080.000
-	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	138.080.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2023		388.500.000

Jakarta, 24 Mei 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan



Budi Sulistiyo



Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari III Lantai 14
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat
Kementerian Kelautan dan Perikanan